



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017**



Oleh:

**DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
MANOKWARI, 29 Maret 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita, sehingga dapat tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017.

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Masyarakat) serta sebagai sarana evaluasi kedalam atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Pelaksanaan tahun anggaran 2017 merupakan tahun awal dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022, namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Papua Barat.

Manokwari, 21 Maret 2018

The seal is circular with a blue border containing the text 'PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT' at the top and 'DINAS KESEHATAN' at the bottom. In the center, there is a smaller circle with 'DINAS KESEHATAN' and 'PAPUA BARAT' written around it.
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

OTTO PARORRONGAN, SKM, M.MKes.
NIP. 19671004 199312 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Kedudukan	3
B. Struktur Organisasi	4
C. Faktor Penentu Keberhasilan	6
BAB II PERENCANAAN	9
A. VISI DAN MISI	10
1. Pernyataan Visi	10
2. Pernyataan Misi	11
B. TUJUAN DAN SASARAN	11
C. STRATEGIS (CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SARAN).....	16
1. Kebijakan	16
2. Program	17
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. EVALUASI KINERJA	28
1. Penetapan Indikator Kinerja	28
2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja	29
3. Pengukuran Kinerja	30
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN	30
C. ASPEK KEUANGAN DAN SARANA PENUNJANG LAINYA	39
1. Keuangan	39
2. Sumber Daya Manusia	48
3. Sarana Penunjang	51

BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	55
I. Perencanaan Strategik	
II. Rencana Kinerja Tahun 2017	
III. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)	
IV. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)	
V. Daftar Aset	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2017. Pencapaian kinerja berupa pelaksanaan kegiatan ini di susun dan dilaksanakan berdasarkan rencana kinerja tahun 2017 yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam tahun 2017 melaksanakan 120 (seratus dua Puluh) kegiatan dalam 39 (tiga puluh sembilan) program untuk memenuhi (delapan) sasaran strategis sesuai rencana kinerja tahun 2017. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp. 198.300.932.132 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 101.584.066.502 (Seratus Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) atau 51,23% dari anggaran yang tersedia.

Tidak tercapainya penyerapan anggaran 100% oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat antara lain disebabkan keterbatasan kuantitas aparat pada Satker Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan dalam melaksanakan berbagai program kegiatan dan mekanisme pencairan dana yang menganut satu pintu.

Dari 8 (delapan) sasaran yang ada dan tingkat pencapaiannya adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Terciptanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik melalui pelayanan administrasi perkantoran (60,31%)

2. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau (30%)
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aparatur (49,61%)
4. Terciptanya pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan (57,52%)
5. Menjamin ketersediaan, mutu, dan pemerataan Sumberdaya Manusia Kesehatan (90%)
6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aparatur (81%)
7. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standard dan terjangkau (50%)
8. Melindungi masyarakat dari penyakit dan mengurangi risiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana (75%)

Rendahnya tingkat pencapaian sasaran tersebut diatas terutama disebabkan jumlah SDM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang relatif masih kurang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2016 Tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7Tahun tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis umum pemerintah daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :

Membantu pengelolaan pembangunan kesehatan yang lebih baik dan keberlanjutan.

- b. Menghasilkan rencana dan pembangunan kesehatan yang terarah kepada memenuhi hak masyarakat.
- c. Memecahkan isu-isu strategis kesehatan, mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerja sama antara instansi masing-masing dan dengan masyarakat
- d. Mengkomunikasikan dan memasarkan eksistensi kesehatan (peningkatkan kesadaran)

- e. Penyediaan pelayanan kesehatan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan
- f. Pengelolaan keuangan lebih baik, terbuka dan akuntabel

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah menyusun rencana strategis tahun 2017 - 2022 yang ditujukan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurung waktu lima tahun. Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan sebagai pendukung/penjabaran dari rencana strategisnya secara spesifik. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada untuk mencapai indikator SPM dan indikator MDGs yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Indikator-indikator ini dijadikan tolak ukur/target sasaran/kegiatan yang harus dicapai dalam waktu satu tahun anggaran.

B. Struktur Organisasi

Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah memiliki struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.. Dalam struktur organisasi tersebut susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan 1 kelompok jabatan Fungsional yang tampak sebagai berikut :

Masing-masing bagian/bidang/kelompok mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kerja, melakukan pembinaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan,

membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

- b. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun Program, Pengaturan dan pengendalian Pelaksanaan pengamatan, penyelidikan epidomologi, imunisasi, pengendalian pelaksanaan pemberantasan penyakit, melaksanakan pengawasan kulaitas air dilingkungan pemukiman dan melaksanakan pengawasan tempat - tempat umum serta tempat pengolahan makanan.
- c. Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan perumusan kebijakan operasional surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular/ tidak menular serta kesehatan jiwa.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. Bidang sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kerja mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRTserta sumber daya kemanusiaan.
- f. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

C. Faktor Penentu Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yaitu :

- 1) Komitmen Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan seluruh staf untuk berperan aktif dalam mengamankan penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Provinsi Papua Barat.

Komitmen pimpinan dan dukungan dari para staf pada suatu organisasi merupakan hal yang penting dalam menopang keleluasaan ruang gerak kreativitas, menciptakan suasana kondusif dalam meningkatkan kinerja mendorong tercapai misi tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

- 2) Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal menyediakan dana.

Berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Papua Barat, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 198.300.932.132 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

Dengan dukungan dana sebesar Rp. 198.300.932.132 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kegiatan lainya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan memerlukan koordinasi antara bidang/bagian yang memadai sehingga pencapaian sasaran program atau kegiatan yang bersangkutan dapat lebih efektif.

- 3) Adanya reformasi manajemen pemerintahan melalui terbitnya peraturan mengenai perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan keuangan Negara / Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip demokratis, peran serta, pemerataan dan keadilan.

Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yakni tata kelola pemerintah

Yang baik, bersih berwibawa, dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya undang-undang nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan Negara; Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP 105 dan 108 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah sebagaimana telah direvisi dengan PP nomor 58 tahun 2005; Kemendagri Nomor 29 tahun 2002 sebagaimana telah direvisi dengan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 dan telah dirubahdengan Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan terkait lainnya, instansi

pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk melakukan perubahan manajemen dan sistem anggarannya sesuai peraturan tersebut.

Dengan reformasi ini Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat diharapkan dapat turut berperan dalam mengelola anggaran yang disediakan dengan melihat aspek-aspek manajemen pengelolaan keuangan daerah dengan lebih baik dan efisiensi mungkin.

BAB II

PERENCANAAN

Sebagai sebuah institusi pelayanan publik mempunyai rencana strategis yang berorientasi selama kurun waktu lima tahun 2017-2022 dengan peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai dengan ketentuan inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP), Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah merencanakan strategis periode tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan taktis strategis untuk menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis adalah suatu alat manajemen, yang merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan manfaat sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi dan mengorganisasikan secara sistematisnya untuk usaha-usahanya melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan pengembangan lingkungan strategis baik lokal maupun nasional.

Analisis terhadap lingkup organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam perhitungan kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan / kendala (threats) yang ada.

Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat terwujudnya visi dan misi serta strategis. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang pemerintah setidaknya mengandung Visi, Misi, Tujuan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya operasi dan prosedur untuk mencapai dan menentukan ukuran kegagalannya.

Dengan visi, misi dan strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan menyalurkan potensi, peluang dan kendala yang di hadapi.

Rencana strategis, bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur paling penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu rencana strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategis pencapaian tujuan atau sasaran berupa dan kegiatan.

A. VISI DAN MISI

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin di capai guna menyatukan komitmen bersama.

dari seluruh pihak yang berkepentingan tugas pokok dan fungsi lima tahun kedepan Papua Barat telah merumuskan visinya sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PAPUA BARAT YANG SEHAT ,
MANDIRI DAN KEADILAN

Visi tersebut di atas merupakan suatu kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum yang hendaknya diwujudkan melalui pelaksanaan peranan Dinas Kesehatan sebagai institusi yang mempunyai tugas pengawasan umum pemerintah daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Pernyataan misi

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dukungan kebijakan dan tata kelola administrasi yang prima, serta mengoptimalkan dukungan kebijakan sistem manajemen dan tugas teknis lainnya.
- b. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau
- c. Menjamin ketersediaan, mutu,
- d. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang memenuhi
- e. Melindungi masyarakat dari penyakit dan mengurangi terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana
- f. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha.

Keenam misi tersebut menjadi fokus segenap personel Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyimpangan dari misi tersebut akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam pencapaian visi yang telah ditetapkan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam usaha mencapai visi dan misi ditetapkan suatu tujuan yang akan dicapaidalam kurun waktu 5 tahun. Tujuan ini harus menjadi fokus para personel Dinas Kesehatan

Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar visi dan misinya tercapai.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Sasaran tersebut merupakan tindakan dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah merumuskanyang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022

***Menyediakan dukungan kebijakan dan tata kelola
Administrasi yang prima, serta mengoptimalkan dukungan
kebijakan sistem manajemen dan tugas teknis lainnya***

Tujuan dan sasaran dari Misi Pertama :

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis.
 - 1.1 Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis dari 1 kali per tahun menjadi 2 kali
2. Ketersediaan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
 - 2.1 laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menjadi 100% sampai tahun 2022 dari setiap Kabupaten/Kota
 - 2.2 Meningkatkan pelayanan prima atas pengaduan masyarakat/rekan

Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
Yang berkualitas, merata dan terjangkau

Tujuan sasaran misi kedua

1. Meningkatkan ketersediaan obat bufer
 - 1.1. Tersedianya obat buffer stock Provinsi Papua Barat sebesar 100% pada tahun 2022
2. Meningkatkan jumlah Rumah Sakit yang melayani pasien penduduk miskin (prioritas OAP) peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 2.1 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan naik menjadi 95 % pada tahun 2022
3. Meningkatkan jumlah Rumah Sakit yang melayani pasien penduduk miskin peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 - 3.1. Jumlah Rumah Sakit yang melayani pasien miskin peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi 14Rumah Sakit
4. Tersedianya RSUD Milik Pemerintah Provinsi
 - 4.1 Berdirinya 1 RSUD Milik Pemerintah Provinsi
5. Tersedianya fasilitas kesehatan tingkat dasar
 - 5.1 Berdirinya Puskesmas dan jaringannya
 - 5.2 Tersediannya pusling darat dan pusling laut

Tujuan dan sasaran misi ketiga

1. Meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan sesuai standar.
 - 1.1 Terpenuhinya standar kompetensi SDM Kesehatan

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang memenuhi
Standard dan terjangkau

1. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir.
 - 1.1 Angka kematian ibu menurun menjadi 228/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi baru lahir menurun menjadi 21/1.000 kelahiran hidup.
2. Menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan meningkatkan cakupan SD/MI yang melaksanakan penjangkaran kesehatan siswa kelas 1
3. Menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita
 - 3.1. Prevalensi gizi kurang pada balita menjadi 15%
4. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas Kabupaten/Kota
 - 4.1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas pada 70% Kabupaten/Kota
5. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sesuai standar pada Kabupaten/Kota
 - 5.1. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sesuai standar pada 70% Kabupaten/Kota
6. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan indera sesuai standar pada Kabupaten/Kota
 - 6.1. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan indera sesuai standar pada 50% Kabupaten/Kota

Melindungi masyarakat dari penyakit dan mengurangi resiko
Terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana

Tujuan dan sasaran misi kelima :

1. Menurunkan API (Annual Parasite Incidence)
 - 1.1. API (Annual Parasite Incidence) menurun hingga 48 0/00 penduduk,
2. Menurunkan prevalence kasus HIV AIDS dan meningkatkan kualitas hidup ODHA.
 - 2.1. Menurunya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <0,5%
3. Penemuan kasus TB dan Angka kesembuhan
 - 3.1. Kasus YB meningkat jadi 75% dan Angka kesemb meningkat menjadi 80%
4. Meningkatkan akses jumlah penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak dan lingkungan yang sehat.
 - 4.1 Meningkatnya akses jumlah penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak dan lingkungan sehat menjadi 55%
5. Meningkatkan Desa UCI (Universal Child Immunization)
 - 5.1. Desa UCI meningkat menjadi 100%
6. Menurunkan angka kematian dan kesakitan karena diare.
 - 6.1. Turunya angka kematian karena diare menjadi 25/100000 penduduk
7. Menurunnya angka kesakitan dan kematian DBD
 - 7.1. Peningkatan peran serta masyarakat.
8. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.
 - 8.1. Pengelola program, lintas program dan sektor terkait, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan instansi terkait lainnya, masyarakat dan kelompok berisiko.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dan Sasaran misi keenam :

1. Meningkatkan persentase Kampung Siaga
 - 1.1. Persentase Kampung Siaga menjadi 60%
2. Mendorong peningkatan kualitas tenaga promosi kesehatan di berbagai jenjang (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Puskesmas)
 - 2.1. Kualitas tenaga promosi kesehatan di berbagai jenjang.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam pengembangan Kampung Siaga.
 - 3.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam pengembangan Kampung Siaga.
4. Meningkatkan jumlah posyandu untuk memiliki jumlah kader terlatih sesuai perbandingan dengan jumlah sasaran.

C. STRATEGI (CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN)

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, telah dirumuskan strategi untuk mencapainya dengan menetapkan kebijakan dan program.

1. KEBIJAKAN

Langkah awal untuk keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

Pada tahun 2017, kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dapat dilihat pada Lampiran I-Perencanaan Strategis

2. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan organisasi agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Dinas kesehatan Provinsi papua Barat telah menetapkan program-program untuk tahun 2017 yang akan dilaksanakan agar memudahkan dalam upaya pencapaian sasaran,tujuan, misi dan visi.

D. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis 2017-2022, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah menetapkan Rencana Kinerja tahun 2017 termasuk menetapkan program yang dibuat bersama dengan Departemen Kesehatan yang didalamnya telah terdapat target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan, demikian pula bobot kinerja dapat ditargetkan dengan dasar indikator kinerja tersebut.

Sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut :

SASARAN 1	
Terciptanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik melalui pelayanan administrasi perkantoran	
PROGRAM	KEGIATAN
1. Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor; 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan; 9. Penyediaan makanan dan minuman;

	<p>10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah;</p> <p>11. Pemutahiran Data Program dan Kepegawaian;</p>
--	--

SASARAN 2	
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aparatur	
PROGRAM	KEGIATAN
<p>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p>1. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor;</p> <p>2. Pengadaan Peralatan kantor;</p> <p>3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;</p> <p>4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;</p> <p>5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;</p> <p>6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;</p> <p>7. Pembangunan talud dan penataan kompleks pergudangan (tahap III);</p> <p>8. Pengadaan lokasi tanah bapelkes dan mess Provinsi Papua Barat;</p> <p>9. Pembangunan penambahan gedung kantor,</p>

	<p>talud dan pos keamanan;</p> <p>10. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Lanjut)</p>
--	--

SASARAN 3	
Meningkatkan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	
PROGRAM	KEGIATAN
1. Peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur	2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
	3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
	4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
	5. Penyusun Peraturan Daerah di Bidang Kesehatan.

SASARAN 4	
Terciptanya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
PROGRAM	KEGIATAN
1. Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan LAKIP OPD
	2. Penyusunan RENJA SERTA RENSTRA 2017-2022 DAN LKPD TA 2016

	3. Pengumpulan Data, Pemutahiran Data, dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi
	4. RAKONTEK DAK Bidang Kesehatan 2017 5. Pelatihan pengelolaan SIK 6. RAKERSDA/ Hari Kesehatan Nasional 7. Penyusunan Jaringan SIK Provinsi Papua Barat

SASARAN 5	
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standard dan terjangkau	
PROGRAM	KEGIATAN
1. Upaya Kesehatan Masyarakat;	1. Pelayanan Kesehatan berbasis masyarakat (Mobil Klinik) 2. Peningkatan Kapasitas Perawat Tentang Pertolongan pertama gawat darurat. 3. Peningkatan Kapasitas BTCLS 4. Peningkatan Kapasitas ATCLS 5. Pelatihan MFR
2. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Pelatihan Tenaga Kesehatan Tentang

Anak Balita	<p>Pelayanan Neonatal</p> <p>2. Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Stimulasi , Deteksi, dan Intervensi tumbuh Dini Kembang</p>
4. kesehatan Rujukan Bagi OAP	<p>1. Rujukan Kesehatan Bagi Orang papua</p> <p>2. Sosialisasi Rujukan Kesehatan Bagi Orang papua</p>

<p>SASARAN 6</p> <p>Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau</p>	
1. Obat Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	<p>1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;</p> <p>2. Distribusi obat ke Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pengelola obat puskesmas;</p>
	<p>4. Evaluasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan RKO Program atau Lintas Sektor</p> <p>5. Pengadaan Selasar instalasi Farmasi</p> <p>6. Pembangunan Taman Instalasi farmasi</p>

SASARAN 7

Menjamin ketersediaan, mutu, dan pemerataan sumberdaya manusia

Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN
1. BIMDAL Perencanaan Dan Pendayagunaan;	1. Pembinaan, Pengembangan dan pengkajian pendayagunaan SDM kesehatan 2. Seleksi dan pengiriman tenaga kesehatan teladan 3. Monitoring dan evaluasi data SDM kesehatan
2. Pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke distrik, kampung terpencil dan terisolir;	1. Menempatkan dokter/bidan desa pada daerah terisolir
3. Pendidikan dan pelatihan;	1. Pelatihan fungsional dan manajemen kesehatan 2. Bantuan beasiswa tenaga kesehatan 3. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik 4. Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis dan nakes untuk RS rujukan papua barat 5. Peningkatan kapasitas Pendidikan tenaga kesehatan sarjana kesehatan masyarakat 6. Peningkatan kapsitas tenaga kesehatan ikatan apoteker Indonesia 7. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan gizi

	8. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan bidan 9. Peningkatan kapsitas tenaga kesehatan perawat 10. Pembangunan gedung bapelkes 11. Pembangunan pagar bapelkes 12. Pembangunan talud jalan masuk bapelkes
4. Program Bimdal Registrasi dan Akreditasi:	1. Sosialisasi, koordinasi, dan penguatan jejaring kerja MTKP 2. Melaksanakansertifikasidan proses registrasi
5. Program bimdal kesehatan rujukan:	1. Penguatan kapasitas tim pembangunan dan operasional RSUD Provinsi Papua Barat 2. Upaya penyelenggaraan system rujukan pertemuan sosialisasi pelayanan unit transfuse daerah

SASARAN 8 Melindungi masyarakat dari penyakit dan mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana	
PROGRAM	KEGIATAN
1. Penanggulangan Penyakit Malaria;	1. Pelatihan Dasar Pengendalian Vektor/ Entomologi 2. Pengadaan Bahan pakai habis Pakai Lab. Malaria (Reage etc..) 3. Pengadaan Inteksida Untuk Penyemprotan 4. Pengadaan Microscop 5. Pengadaan Sprycan dan Fogging

<p>2. Penanggulangan Penyakit DBD;</p> <p>3. Penanggulangan Penyakit Kusta;</p> <p>4. Penanggulangan HIV dan AIDS;</p>	<p>6. Perencanaan Kelambu Masal</p> <p>1. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Dan penanggulangan KLB</p> <p>1. Leprosy day</p> <p>2. Pelatihan Kusta Bagi Tenaga Dokter dan Juru Puskesmas di Kab/ Kota</p> <p>1. Pelatihan Management HIV Komprehensif</p>
<p>5. Kesehatan Lingkungan</p> <p>6. Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan</p> <p>7. Penanggulangan Penyakit Filariasis;</p> <p>8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular</p> <p>9. Penanggulangan ISPA</p>	<p>1. Pengadaan Alat Food Security</p> <p>1. Tim Reaksi Cepat/ RHA</p> <p>2. Pengelolaan data dan Informasi PPK</p> <p>1. Peningkatan Kapasita Petugas</p> <p>1. Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim</p> <p>2. Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular</p> <p>3. Pembentukan POSBINDU</p> <p>4. Melaksanakan Advokasi</p> <p>1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola ISPA Kabupaten</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dituangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Evaluasi kinerja bertujuan agar pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi dapat diketahui sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

A. EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan saran

dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam rangka mewujudkan visinya sesuai dengan rencana strategi yang Penetapan Indikator Kinerja Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat meliputi input, output dan outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (Rp.xxx).

Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan ; waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; serta sarana dan prasarana belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitupula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

Penetapan indikator kinerja beserta target pencapaian indikator kinerja ini mulai dilaksanakan pada saat perumusan rencana strategi. Dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat diadakan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektifitas.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa input, output, dan outcome. Indikator outcome yang merupakan indikator yang digunakan untuk pengukuran pencapaian sasaran belum seluruhnya dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan data. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilaksanakan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja, (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance resut) yang dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Kemudian dilaksanakan analisis terhadap terjadinya cela kinerja (performace gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017 yang digambar dengan tingkat pencapaian sasaran masing-masing sebesar 60,03 % (sasaran 1), 30 % (sasaran 2), 49.61 % (sasaran 3), 57.52 % (sasaran 4), 44 % (sasaran 5), 81 % (sasaran 6), 50 % (sasaran 7), dan 75 % (sasaran 8) dan kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan diuraikan dibawah ini.

Sistematika uraian sedapat mungkin menggambarkan seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat baik yang terangkum dalam sasaran yang sudah ditetapkan maupun kegiatan-kegiatan yang tidak dikenakan tidak tertuang dalam rencana kinerja 2017

Uraian kegiatan digambarkan secara narasi dan dalam bentuk tabel yang diperinci dalam indikator-indikator. Dalam tahun 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategi yang dicapai melalui berbagai program.

SASARAN 1
Terciptanya penyelenggaraan manajemen perkantoran yang baik melalui pelayanan administrasi perkantoran.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2017. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capainnya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.1

Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya efisiensi, efektifitas pengelolaan APBD	Kegiatan	12	12	60,30%

Pelaksanaan Indikator sasaran tersebut melalui 12 (Dua belas) kegiatan. Jumlah dana untuk 12 (dua belas) kegiatan tersebut disiapkan sebesar Rp. 6.437.621.192,00 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) namun dana yang direalisasikan sebesar Rp. 3.882.465.469,00 (Tiga

Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau 60,30 %.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khususnya untuk penyelenggaraan pengawasan di Pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga terwujudnya tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

SASARAN 2
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aparatur

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan tahun 2017. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.2.

Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya sasaran dan prasarana menunjang peningkatan kinerja aparatur	Kegiatan	10	9	49,61 %

Jumlah anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan tersebut disiapkan sebesar Rp. 6.104.595.000,00 (Enam Milyar Seratus Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan

Ribu Rupiah) namun dana yang direalisasikan sebesar Rp. 3.028.244.593,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau 49,61 %.

SASARAN 3
Meningkatkan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2017. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi pencapaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.3
Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Disiplin dan kapasitas aparatur Dinas Kesehatan yang meningkat	Kegiatan	5	3	70 %

Indikator sasaran peningkatan disiplin aparatur dicapai melalui 3 (tiga) kegiatan dengan tingkat pencapaian 87,78% dengan pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.234.200.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus rupiah).

Sedangkan indikator sasaran program peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi perundang-undangandengan pagu anggaran sebesar Rp.1.140.000.000,- yang sebenar akan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan ASN Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang sehingga pada akhirnya mereka akan

mampu melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dengan optimal yang hasilnya akan berguna bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan strategis, namun hal tersebut tidak terlaksana (0%) karena seluruh ASN Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat belum mengikuti diklat kepemimpinan oleh Pusdiklat Bapenas RI yang berkerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Papua Barat.

SASARAN 4
Terciptanya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2017. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan pencapaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.4

Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelaporan Kinerja dan Keuangan tepat waktu.	Kegiatan	7	2	57,52%%

Indikator sasaran Pelaporan Kinerja dan Keuangan tepat waktu dicapai melalui 7 (Tujuh) kegiatan, dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 3.696.032.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) sedangkan dana yang terealisasi sebesar Rp. 1.570.168.557,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Seratus Enam Puluh Delapan Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau 57,52 %.

SASARAN 5

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standard dan terjangkau

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahu 2017. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capainnya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.5

Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunkan Angka Kematian dan Meningkatkan Harapan Hidup.	Kegiatan	10	6	44 %

Indikator sasaran tersebut dicapai melalui 10 (Sepuluh) kegiatan dengan tingkat pencapaian 90 % dengan dana yang disiapkan sebesar RP. 22.692.388.297,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp.20.339.257.641,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) atau 90 % .

Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan sehingga tercapainya harapan hidup yang berkualitas.

SASARAN 6

Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capainya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.6
Indikator Kinerja Sasaran 6

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Yang Memadai dan Tersebar di Setiap Layanan Kesehatan.	Kegiatan	7	5	21,15%

Indikator sasaran tersebut dicapai melalui 7 (Tujuh) kegiatan dengan tingkat pencapaian 21,15 % dengan dana yang disiapkan sebesar Rp. 11.903.822.341,00 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tiha Juta Delapan ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 2.518.188.531,00 (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Tibu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau 21,15 %.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan secara merata dan terjangkau

SASARAN 7
Menjamin Ketersediaan, mutu dan pemerataan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capainya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.7
Indikator Kinerja Sasaran 7

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya Sarana, Pembiayaan dan Tenaga Kesehatan Yang Berkualitas dan Profesional	Kegiatan	18	10	22 %

Indikator sasaran ini dicapai melalui 10 (Sepuluh) kegiatan dengan tingkat Persentase sebesar 22 % , Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 3.558.716. 662, 00 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari total yang di

anggarkan sebesar Rp.16.432.978.000,00 (Enam Belas Milyar Empat ratus Tiga Puluh Dua Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Pencapaian tidak sesuai dengan target disebabkan keterbatasan baik kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

SASARAN 8
Melindungi masyarakat dari penyakit dan mengurangi resiko terjadinya penyakit kecelakaan dan dampak bencana

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capainnya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.8

Indikator Kinerja Sasaran 8

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunkan Angka Kesakitan Dengan Memperhatikan Sanitasi Lingkungan Hidup.	Kegiatan	19	4	31 %

Indikator sasaran ini dicapai melalui 19 (sembilan belas) kegiatan dengan tingkat Penyerapan Rp. 1.952.522.918 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah) atau 31 % Dari Total Pagu yang di anggarakan Sebesar Rp. 6.369.984.460,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat ratus Enam Puluh Rupiah)

Pencapaian tidak sesuai dengan target disebabkan ini keterbatasan baik kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia

C. ASPEK KEUANGAN DAN SASARAN PENUNJANG LAINNYA

1. Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017 dibiayai dari anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA LANGSUNG				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,437,621,192.00	3,882,465,469.00	60.31
1	Penyediaan jasa surat menyurat	24,906,200.00	24,906,200.00	100.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,072,550,000.00	216,948,709.00	20.23
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1,825,850,000.00	1,353,659,098.00	74.14
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	294,575,000.00	164,964,956.00	56.00
6	Penyediaan alat tulis kantor	200,044,992.00	200,044,992.00	100.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200,000,000.00	199,979,200.00	99.99
8	Penyediaan komponen	41,350,000.00	41,250,000.00	99.76

	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	184,000,000.00	80,200,000.00	43.59
10	Penyediaan makanan dan minuman	183,600,000.00	157,925,858.00	86.02
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,060,745,000.00	1,122,307,856.00	54.46
12	Pemutakhiran Data Program dan Kepegawaian	300,000,000.00	270,278,600.00	90.09
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,104,595,000.00	3,028,244,593.00	49.61
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	300,000,000.00	299,500,000.00	99.83
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1,146,195,000.00	623,263,151.00	54.38
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	136,000,000.00	135,133,442.00	99.36
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	72,000,000.00	44,700,000.00	62.08
5	Pembangunan Gedung Kantor	500,000,000.00	498,428,000.00	99.69
6	Pembangunan/Penataan Halaman Gudang Perbekalan Kesehatan	2,000,000,000.00	72,700,000.00	3.64
7	Pembangunan Fasilitas UKBM Percontohan	449,400,000.00	448,628,000.00	99.83
8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2016 (Lanjutan)	421,000,000.00	421,000,000.00	100.00
9	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	485,080,000.00	484,892,000.00	99.96
10	Pengadaan Kanopi dan Pendaratan Medical Boat	594,920,000.00	0.00	0.00
III	Program peningkatan disiplin aparatur	1,234,200,000.00	1,083,390,000.00	87.78
1	Pengadaan pakaian dinas beserta	263,200,000.00	199,640,000.00	75.85

	perlengkapannya			
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	511,000,000.00	460,250,000.00	90.07
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	460,000,000.00	423,500,000.00	92.07
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,140,000,000.00	0.00	0.00
1	Penyusunan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan	1,000,000,000.00	0.00	0.00
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	140,000,000.00	0.00	0.00
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3,696,032,000.00	2,125,863,443.00	57.52
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50,000,000.00	0.00	0.00
2	Penyusunan Renstra dan Renja 2017-2021 serta LKPD	95,000,000.00	0.00	0.00
3	Pengumpulan Data, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi	500,000,000.00	0.00	0.00
4	Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2017	310,000,000.00	0.00	0.00
5	Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	580,000,000.00	0.00	0.00
6	Rapat Kerja Kesehatan Daerah/Hari Kesehatan Nasional	2,161,032,000.00	2,125,863,443.00	98.37
7	Penyusunan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Provinsi Papua Barat.	0.00	0.00	0.00
VI	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11,903,822,341.00	2,518,188,531.00	21.15

1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,000,000,000.00	1,080,661,020.00	18.01
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	200,000,000.00	185,000,000.00	92.50
3	Distribusi Obat ke Kabupaten/Kota	2,003,997,343.00	316,747,511.00	15.81
4	Peningkatan Kapasitas Pengelola Obat Puskesmas	550,000,000.00	537,000,000.00	97.64
5	Evaluasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan RKO Program/Lintas sektor	350,000,000.00	0.00	0.00
6	Pengadaan selasar Instalasi Farmasi	799,825,000.00	0.00	0.00
7	Pembangunan Taman Instalasi Farmasi	1,999,999,998.00	398,780,000.00	19.94
VII Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
VII	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4,749,504,000.00	2,931,663,000.00	61.73
1	Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat (Mobile Klinik)	2,519,504,000.00	2,215,904,000.00	87.95
2	Peningkatan kapasitas Perawat tentang Pertolongan Pertama Gawat Darurat	550,000,000.00	0.00	0.00
3	Peningkatan Kapasitas BTCLS	800,000,000.00	715,759,000.00	89.47
4	Peningkatan Kapasitas ATCLS	550,000,000.00	0.00	0.00
5	Pelatihan MFR	330,000,000.00	0.00	0.00
VIII Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
VIII	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	300,000,000.00	0.00	0.00
1	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat	300,000,000.00	0.00	0.00
IX Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya				
IX	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	14,409,937,712.00	983,737,712.00	6.83
1	Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab.	8,025,000,000.00	294,800,000.00	3.67

	Maybrat			
2	Pembangunan Puskesmas Tahap II Kab. Manokwari Selatan	5,885,000,000.00	189,000,000.00	3.21
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas di Tingkat Distrik 2016 (Lanjutan)	499,937,712.00	499,937,712.00	100.00
X	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	100,529,450,500.00	59,885,274,000.00	59.57
1	Pembangunan rumah sakit	65,529,450,500.00	56,628,328,000.00	86.42
2	Pembangunan rumah sakit umum rujukan provinsi (DAK)	35,000,000,000.00	3,256,946,000.00	9.31
	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak balita	500,000,000.00	498,629,296.00	99.73
XI	Pelatihan Tenaga Kesehatan tentang Pelayanan Neonatal	250,000,000.00	248,629,296.00	99.45
	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00
XII	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	491,342,600.00	202,439,464.00	41.20
1	Evaluasi Pelaksanaan JKN	243,371,300.00	0.00	0.00
2	Sosialisasi Jamkesmas tingkat Provinsi	247,971,300.00	202,439,464.00	81.64
XIII	Program Rujukan Kesehatan bagi orang Papua	17,142,884,297.00	16,908,965,345.00	98.64
1	Rujukan kesehatan bagi orang Papua	16,909,957,980.00	16,729,960,980.00	98.94
2	Sosialisasi Rujukan Kesehatan Bagi Orang Papua tingkat Provinsi	232,926,317.00	179,004,365.00	76.85
3	Program Bimdal	641,514,500.00	299,075,601.00	46.62

	Perencanaan dan Pendayagunaan			
4	Pembinaan, Pengembangan dan Pengkajian Pendayagunaan SDM Kesehatan	119,155,500.00	0.00	0.00
5	Seleksi dan pengiriman tenaga kesehatan teladan	323,359,000.00	299,075,601.00	92.49
6	Monitoring dan Evaluasi data SDM Kesehatan	199,000,000.00	0.00	0.00
XIV	Program pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke distrik, kampung terpencil dan terisolir	0.00	0.00	0.00
1	Menempatkan Dokter/Bidan Desa pada daerah terisolir	0.00	0.00	0.00
XV	Program Bimdal Pendidikan dan Pelatihan	15,448,893,500.00	2,761,011,765.00	17.87
1	Pelatihan fungsional dan manajemen Kesehatan	232,570,000.00	0.00	0.00
2	Bantuan Beasiswa Tenaga Kesehatan	500,000,000.00	393,132,000.00	78.63
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik	300,023,500.00	0.00	0.00
4	Pendidikan bagi calon tenaga dokter spesialis dan Nakes lain untuk RS Rujukan Papua Barat	776,300,000.00	731,162,000.00	94.19
5	Peningkatan Kapaitas Tenaga Kesehatan Sarjana Kesehatan Masyarakat	350,000,000.00	290,000,000.00	82.86
6	Peningkatan Kapaitas Tenaga Kesehatan Ikatan Apoteker Indonesia	340,000,000.00	203,902,400.00	59.97
7	Peningkatan Kapaitas Tenaga Kesehatan Gizi	300,000,000.00	285,620,365.00	95.21
8	Peningkatan Kapaitas Tenaga Kesehatan Bidan	300,000,000.00	0.00	0.00

9	Peningkatan Kapaitas Tenaga Kesehatan Perawat	350,000,000.00	0.00	0.00
10	Pembangunan Gedung BAPELKES	10,000,000,000.00	358,462,000.00	3.58
11	Pembangunan Pagar BAPELKES	1,500,000,000.00	0.00	0.00
12	Pembangunan Talud Jalan masuk BAPELKES	500,000,000.00	498,733,000.00	99.75
XVI Program Bimdal Registrasi dan Akreditasi				
1	Sosialisasi, koordinasi dan penguatan jejaring kerja MTKP	232,570,000.00	0.00	0.00
2	Melaksanakan sertifikasi dan proses registrasi	110,000,000.00	0.00	0.00
XVII Program Bimdal Kesehatan Rujukan				
1	Penguatan Kapasitas Tim Pembangunan dan Operasionalisasi RSUD Provinsi Papua Barat	300,000,000.00	0.00	0.00
2	Upaya Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pertemuan Sosialisasi Pelayanan Unit Transfusi Darah	300,000,000.00	0.00	0.00
XVIII Program Imunisasi				
1	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	250,000,000.00	204,026,600.00	81.61
2	Pengadaan Rantai Dingin (Cold Chain)	500,000,000.00	0.00	0.00
3	Pengadaan Logistik ADS dan Safety Box	250,000,000.00	0.00	0.00
XIX Program Penanggulangan Penyakit Malaria				
1	Pelatihan dasar pengendalian vektor / entomologi	249,999,970.00	0.00	0.00
2	Pengadaan bahan habis pakai lab. Malaria (reagen, slide & box)	500,000,000.00	499,100,000.00	99.82

	slide, lancet, RDT)			
3	Pengadaan Insektisida Untuk Penyemprotan	150,000,000.00	149,636,000.00	99.76
4	Pengadaan Microscop	250,000,000.00	0.00	0.00
5	Pengadaan Sprayacn dan Fogging	250,000,000.00	248,850,000.00	99.54
6	Pencanangan Kelambu Masal	250,000,000.00	246,736,135.00	98.69
XX Program Penanggulangan Penyakit DBD				
1	Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan penanggulangan KLB	250,000,000.00	0.00	0.00
XXI Program Penanggulangan Penyakit Kusta				
1	Leprosy Day	100,471,500.00	0.00	0.00
2	Pelatihan Kusta Bagi Tenaga Dokter dan Juru Puskesmas di Kab/Kota	194,762,990.00	0.00	0.00
XXII Program Penanggulangan HIV/AIDS				
	Pelatihan manajemen HIV komprehensif	1,892,800,000.00	0.00	0.00
XXIII Program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat				
1	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Bidan Desa	776,500,000.00	763,500,000.00	98.33
XXIV Program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit PKS Jamkesmas				
1	Bimtek Dalam rangka Penanganan masalah dalam JKN	165,330,000.00	0.00	0.00
2	Peningkatan Kapasitas	443,400,500.00	0.00	0.00

	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan non Kapitasi di FKTP			
XXV	Program Kesehatan Lingkungan	541,950,000.00	537,000,000.00	99.09
1	Pengadaan Alat Food Security	541,950,000.00	537,000,000.00	99.09
XXVI	Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan	530,000,000.00	0.00	0.00
1	Tim rekasi cepat / RHA	350,000,000.00	0.00	0.00
2	Pengelolaan data dan informasi PKK	180,000,000.00	0.00	0.00
XXVII	Program Pengendalian Penyakit Filariasis	250,000,000.00	0.00	0.00
1	Peningkatan kapasitas Petugas	250,000,000.00	0.00	0.00
XXVIII	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	760,000,000.00	112,627,800.00	14.82
1	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	250,000,000.00	0.00	0.00
2	Sosialisasi penanggulangan Penyakit tidak menular	110,000,000.00	0.00	0.00
3	Pembentukan Posbindu	250,000,000.00	0.00	0.00
4	Melaksanakan advokasi	150,000,000.00	112,627,800.00	75.09
XXIX	Program Penanggulangan ISPA	200,000,000.00	158,572,983.00	79.29
1	Peningkatan kapasitas tenaga pengelola ISPA kabupaten	200,000,000.00	158,572,983.00	79.29
XXX	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	550,000,000.00	501,859,695.00	91.25
1	Rapat koordinasi Peningkatan capaian	250,000,000.00	202,659,695.00	81.06

	SPM			
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	300,000,000.00	299,200,000.00	99.73
XXXI Program Penjarangan kasus TB Positif (+) di Layanan Kesehatan				
1	Pelatihan Hospital DOTS Linkage	250,000,000.00	0.00	0.00
2	Workshop Manejemen TB Anak Tingkat Provinsi	248,350,000.00	202,619,400.00	81.59
XXXII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Frambosia				
1	Pelatihan pemegang program	249,999,775.00	0.00	0.00
2	Penemuan kasus	175,000,000.00	0.00	0.00
XXXIII Program Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah				
1	Pelacakan kasus AFP dan pengambilan spesimen AFP	200,000,000.00	0.00	0.00
2	Peningkatan kapasitas petugas Kesehatan dalam Penanganan KLB	249,999,900.00	0.00	0.00
XXXIV Program Penanggulangan Diare				
1	Pertemuan Monitoring dan evaluasi program pengendalian diare	250,000,000.00	0.00	0.00
2	Peningkatan Kapasitas sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB diare, hepatitis, ISP	299,999,775.00	208,896,500.00	69.63
3	Penanggulangan KLB diare, Hepatitis, ISP	100,000,000.00	0.00	0.00
XXXV Program Kesehatan Haji				
1	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan	350,000,000.00	278,057,370.00	79.44

	Pelayanan Kesehatan Haji			
XXXVI	Program Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	200,000,000.00	164,135,800.00	82.07
1	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	200,000,000.00	164,135,800.00	82.07
XXXVII	Program Kesehatan Jiwa	300,000,080.00	0.00	0.00
1	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa	250,000,000.00	0.00	0.00
2	Konsultasi Teknis Pelayanan Kesehatan Jiwa ke Pusat	50,000,080.00	0.00	0.00
XXXVIII	Program Kesehatan Indra	450,000,000.00	199,500,000.00	44.33
1	Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Indra	250,000,000.00	0.00	0.00
2	Penyediaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Indra	200,000,000.00	199,500,000.00	99.75
	JUMLAH	198,300,932,132.00	101,584,066,502.00	51.23

2. Sumber Daya Manusia

1) Keadaan Pegawai

Posisi pegawai Per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a) Menurut Golongan dan Jabatan

Uraian	Per 31/12/16	Mutasi		Per 31/12/2017
		Mutasi	Kurang	
a. Struktural				
▪ Eselon II	1	-	-	1
▪ Eselon III	5	-	-	5
▪ Eselon IV	15	-	-	15
Sub jumlah	21	-	-	21
b. Fungsional	83	-	1	84
c. Staf	42	-	3	45
Jumlah	146	-	-	150

a) Menurut Pendidikan

Uraian	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
Pegawai							
Struktural							
Kepala	1	-	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
Bidang	1	3	-	-	-	-	4

Kasie & Kasubag	6	14	1	-	-	-	21
Bagian							
Staf	1	29	7	5	-	-	42
Sub Jumlah	10	46	8	5	-	-	69
Pegawai Fungsional	Spesialis			SPK			
Pegawai RSU	2	11	32	-	-	-	45
Mkw							
Pegawai Puskesmas	-	-	-	32	-	-	32
Sub Jumlah	2	11	32	32	-	-	77
JUMLAH	12	57	40	37	-	-	146

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dapat ditinjau dari tugas pokok dan fungsinya maka personel dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat masih kekurangan personil untuk itu perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas personil aparat kesehatan.

3. Sarana Penunjang

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan Mesin
- 3) Gedung dan Bangunan
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Aset tetap lainnya

6) Kontruksi dalam Pekerjaan

Barang inventaris yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat per 31 Desember 2017 seluruhnya telah tercantum dalam daftar inventaris dan dalam keadaan baik dan dapat dilihat dalam lampiran V

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017 disusun berdasarkan instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan instansi.

Dalam rangka pelaksanaan inpres tersebut maka ditetapkan keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/8/2003 tentang pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan LAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2017 menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2017. Pencapaian kinerja berupa pelaksanaan kegiatan ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan rencana kinerja tahun 2017 yang masih mengacu pada rencana strategis 2012 – 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melaksanakan 120 (seratus dua puluh) kegiatan dalam 39 (tiga puluh sembilan) program untuk memenuhi 8 (delapan) sasaran strategis sesuai dengan rencana kinerja tahun 2017.

Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut sebesar Rp.198.300.932.132,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dari jumlah tersebut di atas telah terealisasi sebesar Rp.101.584.066.502,00 (Seratus Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Lima ratus Dua Rupiah) atau 51.23% dari anggaran yang tersedia, dengan uraian sasaran strategis dengan persentasenya sebagai berikut:

1. Terciptanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik melalui pelayanan administrasi perkantoran (60.31%).
2. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau (30%).
3. Meningkatkan ketesedian sarana dan prasarana penunjang aparatur (49.61%)
4. Terciptanya pengembangan system pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan (57,52%)
5. Menjamin ketersediaan, mutu dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan (90%)
6. Meningkatnya ketersediannya sarana dan prasarana aparatur (81%)
7. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau (50%)
8. Melindungi masyarakat dari penyakit dan mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana (75%)

a. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran

1. Kurangnya kuantitas ASN khususnya dalam pengelolaan keuangan pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
2. Rendahnya kualitas ASN pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan keuangan
3. Tidak berjalannya Sistem Pengendalian Interen (SPI) dan belum dibuatnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

b. Strategi pemecahan masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi tersebut, strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas aparat dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dengan melakukan penempatan ASN sesuai dengan disiplin ilmu dan kebutuhan.

2. Meningkatkan kapasitas aparat dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dengan melaksanakan pelatihan bagi pegawai, mengirim untuk mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan, sosialisasi perundang-undangan serta melaksanakan pendidikan kantor sendiri (PKS).
3. Membuat Standar Operasional dan prosedur (SOP) serta Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) baik kegiatan administrasi umum maupun kegiatan pelayanan yang lebih realistis dan terperinci sehingga memudahkan dalam memonitoring pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ini dibuat kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan semoga bapak dan ibu sekalian berkenan memberikan kritik dan saran agar kami dapat memperbaiki laporan ini di tahun-tahun yang akan datang.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk penyelesaian laporan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat



OTTO PARORRONGAN, SKM, M.M.Kes
NIP. 19671004 199312 1 003

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

SASARAN	PROGRAM		KEGIATAN						KET	
URAIAN			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Terciptanya penyienggaraan program yang baik melalui pelayanan administrasi perkantoran.	1.1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Dana Output : Terlaksananya koordinasi. Outcame : Meningkatnya koordinasi program	Rp. buian surat	26.250.000 12 2000	0 12 1348	0% 100.0% 67.4%	
			1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Dana Output : Teriaksananya koordinasi. Outcame : Meningkatnya koordinasi antar program.	Rp. bulan bulan	1.074.750.000 12 12	592.540.458 12 12	55.14% 100.0% 100.0%	
			1.1.3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan.	Input : Dana Output : Terbayamya honor pengelola. Outcame : Meningkatnya disiplin aparatur	Rp. orang/bln Kegiatan	1.027.600.000 36	354.740.441 36	83.18% 100.0% 100.0%	
			1.1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Input : Dana Output : Teriaksananya kebersihan. Outcame : Meningkatnya disiplin aparatur.	Rp. hari orang	212.350.000 1240 69	193.630.000 1240 35	91.18% 100.0% 50.7%	
			1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Input : Dana Output : Tersedianya ATK	Rp. bulan	494.148.800 12	460.092..870 12	93.11% 100.0%	

Xc
asaz
XXa

SASARAN URAIAN	PROGRAM		KEGIATAN					KET		
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
			1.1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Outcame : Meningkatnya Kelancaran Administrasi. Input : Dana Output : Tersedianya barang cetakan.	Kegiatan RP. buah	12 359.750.000 235	12 314.900.000 235	100.0% 87.53% 100.0%	
			1.1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Outcame : Meningkatnya Kelancaran Administrasi. input : Dana Output: Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	Kegiatan Rp. bulan	235 50.5000.000 12	235 11.875.000 12	100.0% 23.51% 100.0%	
			1.1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Outcame : Meningkatnya pelayanan aktifitas dikantor. Input : Dana Output : Tersedianya buku-buku bacaan.	Kegiatan Rp. buah	235 230.000.000 48	235 58.590.000 48	100.0% 25.47% 100.0%	
			1.1.9	Penyediaan makanan & minuman.	Outcame : Meningkatnya pengetahuan aparatur. Input : Dana Ouiput Tersedianya makanan & minuman Outcame : Meningkatnya disiplin aparatur.	Kegiatan Rp. kali kali	48 399.700.000 864 864	48 392.408.983 350 440	100.0% 98.18% 40.5% 50.9%	
			1.1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah	Input : Dana Output : Tertaksananya Rakor & Konsultasi Outcame : Meningkatnya pengetahuan aparat.	Kegiatan Rp. kali kali	48 3.134.600.000 50 50	48 1.565.908.888 14 35	100.0% 49.%% 28.0% 70.0%	

SASARAN	PROGRAM		KEGIATAN						KET	
URAIAN			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program.	2.1	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur.	1.1.11	Pemutahiran data program dan kepegawaian.	Input : Dana Output : Tersedianya data program dan kepegawaian Outcame : Meningkatnya kinerja setiap bklang.	Rp. keg org	272.216.000 3 120	0 0 0	0% 0.0% 0.0%	
			2.1.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Input : Dana Output : Tersedianya perlengkapan Kantor Outeame : Meningkatnya sarana aparatur.	Rp. paket paket	1.896.870.000 1 1	1,125.300.000 1 1	59.32% 100.0% 100.0%	
			2.1.2	Pengadaan peralatan kantor.	Input : Dana Output : Tersedianya peralatan Kantor. Outeame : Meningkatnya sarana aparatur.	Rp. paket paket	529.258.000 54 54	475.500.000 54 54	89.84% 100.0% 100.0%	
			2.1.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Input : Dana Output : Teriaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor Outeame : Meningkatnya sarana aparatur.	Rp. unit unit	24,000,000 1 1	6,000,000 1 1	29.53% 100.0% 100.0%	
			2.1.4	Pengadaan kendaraan Dinas/operasional.	Input : Dana Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional. Outeame : Meningkatnya sarana aparatur.	Rp paket paket	2,868,800,000 1 1	847,208,224 1 1	21.31% 100.0% 100.0%	

URAIAN	KEGIATAN							KET	
	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7			
5	4 4 c rwvi	8	9						
			2.1.5	Pemeliharaan rutin/berkala periengkapan gedung kantor	Input : Dana Output : Tersedianya peralatan Kantor. Outcams : Meningkatnya sarana aparatur.	Rp. paket	24,000,000 1	5,115,000 1	21.13% 100.0%
			2.1.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Input : Dana Output : Tersedianya peralatan Kantor. Outcame : Meningkatnya sarana aparatur.	Rp. paket	75.000.000 1	75.000.000 1	100% 100.0%
			2.1.6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	Input : Dana Output : Tersedianya sarana operasional. Outcame : Meningkatnya sarana aparatur.	Rp. unit	24.000.000 1	6.000.000 1	25.00% 100.0%
			2.1.7	Pembangunan talud dan penataan halaman kompleks pergudangan thp.III	Input : Dana Output : Tersedianya sarana . Pergudangan yang aman dan bersih. Outcame : Meningkatnya sarana penyimpanan barang aparatur.	Rp. paket	6.446.034.000 1	6.406.681.000 1	93.39% 100.0%
			2.1.8	Pengadaan lokasi tanah bapelkes dan mess Provinsi Papua Barat	Input : Dana Output : Tersedianya lokasi pembangunan bapelkes dan mess kesehatan. Outcame : Meningkatnya fasilitas penunjang diktat di bidang kesehatan.	Rp. paket	5.400.000.000 1	5.150.000.000 1	95.37% 100.0%

SASARAN URAIAN	PROGRAM		URAIAN		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET			
1	2		3		4	5	6	7	8	9		
Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur.	3.1	Peningkatan disiplin aparatur.	2.1.9	Pembangunan penambahan gedung kantor, telud dan pos keamadaian	Input .Dana Output : Tersedianya sarana ruang kerja bagi aparatur. Outcame : Meningkatnya sarana kerja aparatur.	Rp. unit unit	7.283.273.978 1 1	7.247.046.000 1 1	99.50% 100.0%			
			2.1.10	Pemeiharaan rutin/berkaia perengkanan gedung kantor (lanjutan).	Input : Dana Output : Tersedianya peralatan Kantor. Outcame : Meningkatnya sarana aparatur.	Rp. unit unit	3.211.800.000 1 1	3.091.900.000 0 0	96.27% 0.0% 0.0%			
			3.1.1	Pengadaan pakaian ainas beserta perlengkapannya.	Input : Dana Output : Tersedianya pakaian dinas. Outcame : Meningkatnya disiplin aparatur.	Rp. stel orang	313.200.000 69 69	311.150.000 69 69	99.35% 100.0% 100.0%			
			3.1.2	Pengadaan pakaian khusushari-haritertentu.	Input : Dana Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu. Outcame : Meningkatnya disiplin aparatur.	Rp stel orang	126.000.000 69 69	126.000.000 69 69	100% 100.0% 100.0%			
			3.2	Peningkatan kapasitas sumber	3.2.1	Sosialiasasi peraturan perundang-undangan .	Input : Dana Output : Pegawai yang mengikuti Diktat.	Rp. orang	146.500.000 1	0 0	0% 	
				daya aparatur.			Outcame : Penyetahuan SDM Kesehatan yang meningkat.	orang	1	0	0.0%	
			3.2.2	Penyusunan peraturan daerah di bidang kesehatan.	Input : Dana Output : Terbitnya Perda tentang Kesehatan.	Rp. Paket	500,000,000 1	0 0	0.0% 0.0%			

URAIAN	KEGIATAN							KET			
	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Terciptanya pengembangan Sistem Peiaporan capaian Kinerja dan Keuangan.	4.1	Peningkatan Pengembangan Sistem Peiaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	4.1.1	Penyusunan Renja dan LKPD Satker	Outcame : Adanya Perda Khusus bidang kesehatan di Papua Barat.	orang	1	0	0.0%		
					Input : Dana	Rp.	49.581.480	.	0.0%		
					Output : Tersusunnya Renja dan LKPD	dokumen	1	1	100.0%		
							Outeame : Tersediannya Renja dan LKPD Satker.	dokumen	1	1	100.0%
			4.1.2	Pengumpulan data, Pemutahiran data dan penyusunan profil kesehatan pruvinsi.	input : Dana	Rp.	626.005.150		0.0%		
					Output : Tersusunnya laporan data profil kesehatan.	dokumen	1	1			
					Outcame : Terkontrolnya kinerja aparatur dalam pengumpulan data profit.	laporan	1	1	100.0%		
			4.1.3	Pengadaan Aplikasi Simpus Jojo/Sikda untuk Puskesmas se-Provinsi Papua Barat	Input : Dana	Rp.	1.493.359.113		0.0%		
					Output : Tersediannya biaya Pengadaan Aplikasi Simpus Jojo/Sikaa untuk Fuskemas se-Provinsi Papua Barat	paket	1	1	100.0%		
					Outcame : Pengelolaan data di Puskesmas semakin berkualitas.	paket	1	1	100.0%		
			4.1.4	Pelatihan Pengelolaan SIK Provinsi Papua Barat	input : Dana	Rp.	206.403.000		0.0%		
					Output : Teriaksnanya kegiatan Pelatihan Pengetola SIK Provinsi Papua Barat.	kegiatan	1	1	100.0%		
Outcame : Meningkatnya kinerja	kegiatan	1			1	100.0%					

tenaga pengelola sistem informasi kesehatan.

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN						KET	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
		4.1.5	Pelatihan perencanaan	Input : Dana		246.503 000	0	0.0%	
			sembangunan berbasis masyarakat	Output : Tersediannya biaya Pelatohan Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat.	kegiatan	1	1	100.0%	
				Outeame : Terlaksananya Pslatihan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat.	kegiatan	1	1	100.0%	
		4.1.6	Peningkatan pengetahuan	input : Dana	Rp.	135.072.000	0	0.0%	
			bendahara dalamngelola keuangan	Output : Terlaksananya Peningkatan pengetahuan bendahara dalam mengelola keuangan daerah.	kegiatan	1	1	100.0%	
				Outeame : Meningkatnya pengetahuan bendahara dalam mengelola keuangan daerah.	Kegiatan	1	1	100.0%	
		4.1.7	Rapat Kerja Kesehatan daerah	Input : Dana	Rp.	1.287.390.500	1.243.199.800	96.6%	
				Output : Tersediannya biaya rapat kerja kesehatan daerah.	paket	1	1	100.0%	
				Outeame : Terlaksananya rapat kerja kesehatan daerah.	paket	1	1	100.0%	
		4.1.8	Pengadaan media	Input : Dana	Rp.	698,600,000	698,600,000	100.0%	
			informasi kesehatan (lanjutan).	Output : Tersediannya biaya pengadaan media informasi kesehatan.	dokumen	1	1	100.0%	
				Outeame : Terlaksananya per.gadaan	laporan	1	1	100.0%	

					media informasi kesehatan.				
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

SASARAN URAIAN	PROGRAM		URAIAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	
Buffer stock obat provinsi tercukupi selama 18 bulan	5.1	Perbekalan obat farmasi	5.1.1	Penpsunan Laporan Caparan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPO.	Input : Dana	Rp.	49,481,480	0	0.0%		
					Output : Tersusunnya laporan Kinerja.	dokumen	1	1	100.0%		
					Outcame : Terkontrolnya kinerja dan realisasi keuangan.	laporan	1	1	100.0%		
			5.1.1	Pengadaan obat dan peftekaian kesehatan		Input : Dana	Rp.	11,602,572,515	11,244,684,848	96.9%	
						Output : Ketersediaan obat 100 %.	dokumen	1	1	100.0%	
						Outcame : Kebutuhan obat provinsi terpenuhi selama 18 buian	laporan	1	1	100.0%	
			5.1.2	Kontribusi obat ke Kab/Kota		Input : Dana	Rp.	553,719,808	521,779,000	94.2%	
						Output : Terlaksananya pendistribusian obat ke Kabupaten	dokumen	1	1	100.0%	
			5.1.3	Peningkatan kapasitas pertgeiola obat puskesmas		Input : Dana	Rp.	214,402,000	0	0.0%	
						Output : Tertaksananya pertemuan peningkatan kapasitas pengelola obat	Kegiatan	1	0	0.0%	
5.1.4	Pengadaan incenerator (DAK)		Input : Dana	Rp.	1,484,360,000	1,481,889,000	99.8%				
			Output : Terlaksananya pengadaan incenerator (DAK).	paket	1	1	100.0%				

					Outcome : Tersediannya inceneratorof (DAK)	paket	1	1	100.0%	
--	--	--	--	--	--	-------	---	---	--------	--

SASARAN			KEGIATAN						KET
URAIAN	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Menurunkan Angka Kematian Ibu dari 294/100.000 KH (sesuai laporan aitin) menjadi 202/1 00.000 KH	6.1	Upaya Kesehatan Masyarakat	5.1.5	Pengadaan housing incenerator (pendamping DAK)	Input : Dana	Rp.	148,436,000	148,353,000	99.9%
					Output : Tertaksananya pengadaan incenerator (DAK).	paket	1	1	100.0%
					Outcome : Tersediannya incenerator DAK)	paket	1	1	100.0%
			5.1.6	Pengepakan, pendistribusian dari Provinsi ke Kabupaten dan 9 RS serta Fasilitas gedung obat	Input : Dana	Rp.	1,184,425,030	827,385,000	69.9%
					Output : Teriaksananya Pengepakan, redistribusian dari Provinsi ke Kabupaten dan 9 RS serta Fasilitas gedung obat	dokumen	1	1	100.0%
					Outcome : Ketersediaan obat 100 %.	laporan	1	1	100.0%
			6.1.1	Peiayanan kesehatan berbasis masyarakat.	Input : Dana	Rp.	2,951,300,000	962,924,500	32.6%
					Output : Teriaksananya kegiatan pelayanan berbasis masyarakat	kali	1	1	100.0%
					Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengatasi kesehatan sendiri.	kegiatan	1	1	100.0%
			6.1.2	Pelatihan Tim pendampingan akreditasi puskesmas tingkat Provinsi.	Input : Dana	Rp.	271,760,000	0	0.0%
		Output : Teriaksananya kegiatan pelstihan Tim pendampingan akreditasi puskesmas Bngkat Provinsi	orang	22	0	0.0%			

				Outcome : Meningkatnya pengetahuan petugas puskesmas.	orang	22	0	0.0%	
--	--	--	--	---	-------	----	---	------	--

SASARAN URAIAN	PROGRAM	KEGIATAN							KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Memperkenalkan penggunaan obat asli Papua.	7.1	Pengembangan obat asli Indonesia	7.1.1	Pendataan dan pembinaan tanaman obat asli Papua.	Input : Dana	Rp.	118,250,000	0	0.0%
					Output : 100% tanaman obat asli Papua terdata.	Laporan	1	0	0.0%
					Outcome : Peningkatan penggunaan obat asli Indonesia.	dokumen	1	0	0.0%
Terpaparnya informasi tentang kesehatan kepada masyarakat	8.1	Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	8.1.1	Pengadaan media promosi kesehatan	Input : Dana	Rp.	2,558,800,000	1,846,328,000	72.2%
					Output : Jumlah media promkes yang dihasilkan.	paket	1	1	100.0%
					Outcome : Tersediannya media program Promkes.	paket	1	1	100.0%
Prevalensi gizi kurang pada balita	9.1	Perbaikan gizi masyarakat	9.1.1	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Input : Dana	Rp.	650,000,000	648,645,000	99.8%
					Output : Tersediannya bahan PMT dan vitamin bagi balita gizi buruk.	paket	1	1	100.0%
					Outcome : Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk.	paket	1	1	100.0%
			9.1.2	Pengadaan bangunan dan fasilitas TFC	Input : Dana	Rp.	1,106,000,000	1,097,200,000	99.2%
					Output : Adanya fasilitas TFC.	kegiatan	1	1	100.0%
					Outcome : Meningkatnya persentase balita gizi buruk yang terdeteksi dan mendapat perawatan.	kegiatan	1	1	100.0%
9.1.3	Pelatihan tenaga Kesenatan daian Penggunaan standar jemantauan dan	Input : Dana	Rp.	112,351,000	0	0.0%			
		Output : Terselenggarakannya pelatihan tenaga kesehatan dalam penggunaan standar pemantauan dan	kegiatan	1	0	0.0%			

dan angka kematian bayi baru lahir	keselamatan ibu melahirkan dan anak.	organisasi profesi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.	Output : Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan.	dokumen	1	-	0.0%
			Outcame : Cakupan K1; cakupan K4; cakupan PN.	laporan	1	-	0.0%

SASARAN		KEGIATAN							KET	
URAIAN	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA			
Cakupan Kepesertaan iaminan kesehatan naik menjadi 95% padatahun 2016.	13.1	Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.1.2	Delatihan pencegahan penularan H'V dari ibu ke Anak (PPIA)	Input : Dana	Rp.	263,872,000	-	0.0%	
					Output : Jumlah dokumen kemitraan yang dihasilkan.	dokumen	2	-	0.0%	
					Outoame : Cakupan K1; cakupan K4; cakupan PN; cakupan KF1; cakupan KN1, cakupan PK dan cakupan peserta KB aktif(CPR).	laporan	2	-	0.0%	
			13.1	Evaluasi pelaksanaan JKN	Input : Dana	RP.	199,317,000	145,843,649	73.2%	100.0%
Fasilitas pelayanan memiliki jumlah tenaga sesuai Standar	14.1	Rujukan kesehatan bagi orang Papua	14.1	Rujukan kesehatan bagi orang Papua	Output : Tersedia 1 taporan	dokumen	1	1	100.0%	
					Outcame : Peningkatan Jayanan Jamkesmas	laporan	1	1		
					Input . Dana	Rp.	7,000,000,000	6,559,214,454	93.7%	
					Output : 100 % pasten sakit berat dirujuk	dokumen	1	1	100.0%	
	15.1	Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan.	15.1	Fengumpulan dan analisa data perencanaan dan pendayagunaan	Input : Dana	Rp.	235,889,000	211,251,150	89.6%	
					Output : Jumlah dokumen perencanaan SDMK Kab/Kota	dokumen	1	1	100.0%	
					Outcame : Pemenuhan SDMK sesuai standar kebutuhan	laporan	1	1	100.0%	

			15.2	Koordinasi lintas sektor dalam pengembangan dan perencanaan SDM	Input : Dana Output : Jumlah dokumen kesepakatan Outcome : Pemenuhan SDMK sesuai standar kebutuhan	Rp. paket laporan	227,723,000 1 1	- - -	0.0% 0.0% 0.0%	
SASARAN URAIAN	PROGRAM		KEGIATAN						KET	
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Terpenuhinya standar kompetensi SDM Kesehatan	16.1	Program pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke kampung terpencil dan terisolir	16.1	Penempatan tenaga kesehatan strategis pada daerah perbatasan	Input : Dana	Rp.	500,000,000	-	0.0%	
					Output : Jumlah lokasi DTPK Outcome : Terlayannya masyarakat kampung terpencil dan terisolir	dokumen laporan	1 1	- -	0.0% 0.0%	
			16.2	Menempatkan dokter/bidan desa pada daerah terisolir	Input : Dana	Rp.	916,500,000	546,000,000	59.6%	
					Output : Persen desa terisi btdan Outcome : Terlayannya masyarakat kampung terpencil dan terisolir	dokumen laporan	1 1	1 1	100.0% 100.0%	
	17.1	Bimda! Pendidikan dan Pelatihan	17.1	Santunan beasiswa tenaga kesehatan	Input : Dana	Rp.	915,500,000	546,000,000	59.6%	
					Output : Persen desa terisi bidan Outcome : Kompetensi SDMK sesuai standar pelayanan	dokumen laporan	1 1	1 1	100.0% 100.0%	
			17.2	Koordinasi lintas sektor dalam rangka pembinaan dan pengembangan bimda diklat	Input : Dana	Rp.	200,000,000	156,366,695	78.2%	
					Output : Jumlah dokumen kesepakatan Outcome : Kompetensi SDMK sesuai standar pelayanan	dokumen laporan	1 1	1 1	100.0% 100.0%	
			17.3	Pembinaan bimda pendidikan dan pelatihan	Input : Dana	Rp.	341,000,000	0	0.0%	
					Output : Tertaksananya pembinaan program diklat	dokumen	1	0	0.0%	

			7.4	Pendidikan bagi caion tenaga dokterspesialisRS Rujukan Papua Barat	Outeame : Kompetensi SDMk sesuai standar pelayanan nput : Dana Output : Jumlah Dokter Spesialis yang mengikuti pendidikan	laporan Rp. orang	1 2,500,000,000 4	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	
SASARAN	PROGRAM		KEGIATAN							KET
URAIAN			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Seluruh tenaga kesehatan memiliki SIR	18.1	Registrasi dan angreditasi.	18.1.1	Sosialisasi, koordinasi dan penguatan jejaring kerja MTKP	Outcame : Kompetensi SDMk sesuai standar pelayanan nput : Dana Output : jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan.	laporan Rp. dokumen	1 318,761,000 1	0 269,668,015 1	0.0% 84.6% 100.0%	
			18.1.2	Melaksanakan sertifikasi dan proses registrasi	Outcame : Terjaganya mutu tenaga kesehatan Input : Dana Output : Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	laporan Rp. dokumen	1 94,916,000 1	1 0 0	100.0% 0.0% 0.0%	
			19.1.1	Penguatan kapasitas Tim pembangunan dan operasionalisasi RSUD Provinsi Papua Barat	Outcame : Terjaganya mutu tenaga Kesehatan Input : Dana Output : frekuensi penguatan kapasitas yang dilaksanakan	laporan Rp-kali	1 223,750,000 1	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	
5 fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan terakreditasi sampai dengan tahun2016	19.1	Program Bimdal Kesehatan Rujukan	19.1.2	Upaya penyelenggaraan sistem rujukan	Outcame : jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi Input : Dana Output : jumlah pertemuan sosialisasi yang dilaksanakan	laporan Rp. kali	1 109,331,000 1	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	
					Outcame : jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi	laporan	1	0	0.0%	

Penyelenggaraan dan pengembangan	20.1	Program Bimbal Kesehatan Khusus	20.1.1	Pertemuan dan dukungan operasional untuk komite daerah PGPKT Sorong	Input : Dana Output : persentase Komite Daerah PGPKT Sorong yang mendapatkan dukungan operasional	Rp. PGPKT Sorong	333,604,000 1	268,121,800 1	80.4% 100.0%	
----------------------------------	------	---------------------------------	--------	---	--	------------------------	------------------	------------------	-----------------	--

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN						KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
pelayanan kesehatan khusus sesuai standar pada 70% Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2016		20.1.2	Pertemuan koordinasi penyetenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan usia lanjut	Outcome : persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan khusus sesuai standar.	Kab/Kota	1	1	100.0%
				Input : Dana	Rp.	167,915,000	130,260,015	77.6%
				Output : jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	dokumen	1	1	100.0%
		20.1.3	Pertemuan koordinasi penyelenggaraan dan Pengembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Outcome : persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan khusus sesuai standar.	Kab/Kota	1	1	100.0%
				Input : Dana	Rp.	175,000,000	0	0.0%
				Output : jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	dokumen	1	0	0.0%
			Outcome : persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan	Kab/Kota	1	0	0.0%	

			20.1.4	Pertemuan koordinasi	khusus sesuai standar. Input : Dana	Rp.	182,240,000	156,002,935	85.6%	
				Pelayanan kesehatan haji daerah	Output : jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan	dokumen	1	1	100.0%	

SASARAN	PROGRAM		KEGIATAN						KET	
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				Outcame : persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan khusus sesuai standar.	Kab/Kota	1	1	100.0%		
Desa UCI meningkat menjadi 100% ditahun 2016	21.1	Pengelolaan vaksin dan imunisasi	21.1.1	Pendistribusian logistik dan vaksin ke kabupaten	input : Dana Output : Jumlah Kabupaten/kota yang didistribusi logistik dan vaksin	Rp. kali	1,262,700,000 12	1,009,040,000 12	79.9% 100.0%	
API (annual Parasite Insidence) menuain hingga 48 0/00 penduduk di Tahun 2016	22.1	Penanggulangan penyakit malaria	22.1.1	Pengadaan bahan habis pakai laboratorium malaria	Outcame : Pencapaian Dei desa Input : Dana Output : Tersedianya logistik malaria yang cukup	laporan Rp. kali	1 850,000,000 1	1 845,671,750 1	100.0% 99.5% 100.0%	
Peningkatan peran serta masyarakat	23.1	Penanggulangan penyakit DBD	23.1.1	Sistem kewaspadaan dini (SKD) dan Penanggulangan KLB	Input : Dana Output : jumlah Kab/Kota yang tanggap dengan KLB DBD	Rp. laporan	95,000,000 12	29,678,000 12	31.2% 100.0%	
Persentase cacat tk 2 menurun jadi 35 % ditahun 2016.	24.1	Penanggulangan penyakit kusta	24.1.1	Pemeriksaan kontak penemuan pasien baru)	Outcame : Menurunnya angka positif DBD Input : Dana Output : Mencari penderita baru yang	laporan Rp. orang	12 54,000,000 150	12 0 0	100.0% 0.0% 0.0%	

				sudah lama ada dan belum di temukan dan di obatj Outcame : Menurunnya angka cacat tingkat 2 akibat kusta	laporan	12	0	0.0%	
--	--	--	--	---	---------	----	---	------	--

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN							KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Penemuan kasus TB meningkat menjadi 75 % dan Angka kesembuhan meningkat menjadi 80% ditahun 2016	25.1	Penanggulangan penyakit TB	24.1.2	Petetihan kusta bagi tenaga dokter dan juru puskesmas di kab/kota	Input : Dana Output : Meningkatkan SDM, menemukan penderita secara dini dan mencegah cacat Outcame : Menurunnya angka cacat tingkat 2 akibat kusta	Rp. kegiatan laporan	141,000,000 1 12	110,861,200 1 12	78.6% 100.0% 100.0%
			25.1.1	Pengadaan logistik	Input : Dana Output : jumlah alat dan bahan logistik yang diadakan Outcame : Menurunnya angka kasus baru TB BTA Positif	Rp. paket orang	943,000,000 1 775	938,402,500 1 125	99.5% 100.0% 16.1%
			25.1.2	Monitoring dan evaluasi program TB	Input : Dana Output : Meningkatnya mutu layanan di Puskesmas dan RS Outcame : Menurunnya angka kasus baru TB BTA Positif	Rp. Kab/Kota orang	141,000,000 11 775	0 0 125	0.0% 0.0% 16.1%
			25.1.1	Pengadaan bahan habis pakai laboratorium HIV/AIDS	Input : Dana Output : jumlah alat dan bahan togistik yang diadakan Outcame : Menurunnya prevatensi HIV pada penduduk usia 1 5-49 menjadi	Rp. paket orang	1,441,300,000 1 775	1,426,545,000 1 125	99.0% 100.0% 16.1%
itenerunnya prevalensi HIV pada Penduduk usia 15-49 menjadi <0,5% padatahun2016	25.1	Penanggulan penyakit HIV AIDS	25.1.1	Pengadaan bahan habis pakai laboratorium HIV/AIDS	Input : Dana Output : jumlah alat dan bahan togistik yang diadakan Outcame : Menurunnya prevatensi HIV pada penduduk usia 1 5-49 menjadi	Rp. paket orang	1,441,300,000 1 775	1,426,545,000 1 125	99.0% 100.0% 16.1%

			25.1.2	Pertemuan monitoring dan evaluasi program HIV/AIDS	<0,5% pada tahun 2016 Input : Dana Output : Teriaksananya kegiatan pertemuan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan	Rp. kali	141,000,000 1	113,701,800 1	80.6% 100.0%	
--	--	--	--------	--	---	-------------	------------------	------------------	-----------------	--

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN							KET	
		URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI!	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatkan upaya Denanggulangan crisis kesehatan dan 5 kab/Kota menjadi 13 Kabupaten/Kota	26.1	Peningkatan kewaspadaan dini terhadap wabah dan bencana.	26.1.1	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam manajemen bencana bidang kesehatan	Output : Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 1549 menjadi <0,5% pada tahun 2016 Input : Dana Output : Tersedianya petugas lesehatan yang mampu dalam menanggulangi kasus dampak bencana	orang Rp. kali	775 141,000,000 1	125 102,093,000 1	16.1% 72.4% 100.0%	
Penduduk yang mengakses sanitasi dasar yang layak dan lingkungan sehat	27.1	Pengembangan lingkungan sehat.	27.1.1	Kajian peran serta masyarakat tentang percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)	Output : meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat Input : Dana Output : jumlah dokumen percepatan aembangunan sanitasi pemukiman [PPSP) yang tersedia	laporan Rp. dokumen	2 145,600,000 1	1 26,986,700 1	50.0% 18.5% 100.0%	
Jari jumlah posyandu yang ada, dapat menjalankan fungsinya dengan baik	28.1	Program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga	28.1.1	Peningkatan kapasitas kelembagaan posyandu	Output : Meningkatkan jumlah penduduk terhadap akses sanitasi yang layak dan lingkungan sehat input : Dana Output : Meningkatnya kemampuan kelembagaan Posyandu Output : Meningkatnya kapasitas	laporan Rp. kali laporan	1 123,671,000 1 2	1 0 1 1	100.0% 0.0% 100.0% 50.0%	

jumlah Rumah Sakit yang melayani pasien miskin peserta	29.1	masyarakat program Peningkatan Jumlah Rumah Sakit PKS jamkesmas	29.1.1	Pertemuan jejaring Rumah Sakit se-Provinsi Papua Barat	kelembagaan posyandu i Input : Dana Output : Rumah Sakit PKS Jamkesmas Sebanyak URS	Rp. RS	143,338,000 11	0 0	0.0% 0.0%	
--	------	---	--------	--	--	-----------	-------------------	--------	--------------	--

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN							KET	
		URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi 14 Rumah SakIL				Outcome : Peningkatan layanan esehatan rujukan bagi peserta amkesmas	laporan	1	0	0.0%		
Berdiri 1 RSUD Tingkat Provinsi	30.1	Pengadaan Sarana dan pasarana Rumah Sakit	30.1.1	Pembangunan Rumah Sakit tahap II	Input : Dana Output : Tersedianya sarana dan prasarana RSUD. Outcame : Peningkatan layanan kesehatan rujukan di Provinsi Papua Barat.	Rp. pake! laporan	80,124,000,000 1 1	54,586,863,000 1 1	68.1% 100.0% 100.0%	
			30.1.2	Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit	Input : Dana Output : Tersedia peralatan RSUD Outcame : Peningkatan layanan kesehatan rujukan di Provinsi Papua Barat.	Rp. paket laporan	4,704,785,646 1 1	1,849,949,058 1 1	39.3% 100.0% 100.0%	
Meningkatnya akses jumlah penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak dan lingkungan sehat menjadi 55 % di tahun 2016	31.1	Kesehatan Lingkungan	31.1.1	Pengadaan alat food securiti	Input : Dana Output : Tersedianya kit pemeriksaan makanan Outcame : Meningkatkan jumlah penduduk terhadap akses sanitasi yang layak dan lingkungan sehat	Rp. paket laporan	600,000,000 1 1	597,000,000 1 1	99.5% 100.0% 100.0%	
menurunnya angka	32.1	Penanggulangan	32.1.1	Belanja barang habis	Input : Dana	Rp.	280,800,000	280,560,000	99.9%	

mikrofilaria menjadi Kurang dari 1%di tahun 2016	Penyakit filariasis	pakai	Output : Tersedianya sarana prasarana penunjang program filariasis	paket	1	1	100.0%	
--	---------------------	-------	--	-------	---	---	--------	--

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN							KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		32.1.2	Pertemuan koordinasi pelaksanaan POMP tingkat Provinsi	Outcame : Menurunnya angka mikrofilaria Input : Dana Output : Terlaksananya pertemuan Koordinasi pelaksanaan POMP tingkat Provinsi	laporan Rp. kegiatan	1 280,800,000 1	1 280,560,000 1	100.0% 99.9% 100.0%	
		32.1.3	Pertemuan sosialisasi penyakit fiariasis internal Dinkes Provinsi Papua Barat	Outcame : Menurunnya angka mikrofilaria input : Dana Output : Terselenggarannya pertemuan sosialisasi penyakit fiariasis internal Dinkes Provinsi Papua Barat	laporan Rp. kegiatan	1 3,250,000 1	1 0 0	100.0% 0.0% 0.0%	
		32.1.4	Pertemuan pembentukar KADFI tingkat Provinsi	Outcame : Menurunnya angka mikrofilaria Input : Dana Output : Terselenggarannya pertemuan pembentukan KADFI tingkat Provinsi	laporan Rp. kegiatan	1 34,350,000 1	0 0 0	0.0% 0.0% 0.0%	
		32.1.5	Pencanangan POMP tingkat Provinsi tahun t2015	Outcame : Menurunnya angka mikrofilaria Input : Dana Output : Tertaksannya kegiatan	laporan Rp. kegiatan	1 16,050,000 1	0 16,050,000 1	0.0% 100.0% 100.0%	

				logistik Alkes dan BHP PTM (IVA) Outcame : persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan	laporsn	1	1	100.0%	
--	--	--	--	---	---------	---	---	--------	--

SASARAN URAIAN	PROGRAM		KEGIATAN						KET	
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
			33.1.7	Pertemuan sosialisasi KTR dan program PTM pada SKPD Provinsi Papua Barat	Input : Dana Output : Tersetenggarannya pertemuan sosialisasi KTR dan program PTM pada SKPD Provinsi Papua Barat Outcame : persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 1 fasilitas kesehatan yang menyetenggarakan dan mengembangkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.	Rp. laporan	103,500,000 1 1	101,196,900 1 1	97.8% 100.0% 100.0%	

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat



OTTO BARORRONGAN, SKM, M.M.Kes
NIP. 19671004 199312 1 003

**DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	SASARAN						KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terciptanya penyetenggaraan manajemen perkantoran yang baik melalui pelayanan administrasi perkantoran.	Meningkatnya efisiensi, efektifitas pengetolaan APBD.	Kegiatan	11	9	82%	
2.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aparatur.	Tersedianya sarana dan prasarana menunjang peningkatan kinerja aparatur.	Kegiatan	10	10	100%	
3.	Meningkatkan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur.	Disiplin dan kapasrtas aparat Dinas Kesehatan yang meningkat.	Orang	69	69	100%	
4.	Terciptanya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Kegiatan	9	2	22%	
5.	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standard dan terjangkau.	Menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup.	Kegiatan	16	7	44%	
6.	Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Tersedianya sarana prasarana kesehatan yang memadai dan tersebar di setiap layanan kesehatan.	Kegiatan	16	13	81%	
7.	Menjamin ketersediaan, mutu dan pemerataan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Tersedianya sarana, pembiayaan dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional.	Kegiatan	10	5	50%	

No	SASARAN						KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Melindungi masyarakat dari penyakit dan mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana	Menurunkan angka kesakitan dengan memperhatikan sanitasi lingkungan hidup.	Kegiatan	24	18	75%	

No	SASARAN						KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Melindungi masyarakat dari penyakit dan mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana	Menurunkan angka kesakitan dengan mempertlatikan sanitasi Lingkungan hidup.	Kegiatan	24	18	75%	

**PERENCANAAN STRATEGIK DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUM 2017 S.D. 2022**

VISI : MEWUJUDKAN PAPUA BARAT YANG TEPAT, BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERKEADILAN
MISI I : MENYEDIAKAN DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN TATAKELOLA ADMINISTRASI YANG PRIMA, SERTA
MENGOPTIMALKAN DUKUNGAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis dari 1 kali per tahun menjadi 2 kali.	Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis dari 1 kali per tahun menjadi 2 kali.	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis.	Memanfaatkan pertemuan Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis sebagai wadah pertukaran informasi.
Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan kesehatan menjadi 5% setiap tahun dari total APBD Provinsi sampai tahun 2016 untuk membiayai sarana dan prasarana.	Alokasi anggaran pembangunan kesehatan menjadi 5% setiap tahun dari total APBD Provinsi sampai tahun 2016 untuk membiayai penyelenggaraan sarana dan prasarana.	Melakukan advokasi dalam rangka peningkatan alokasi anggaran pembangunan kesehatan kepada stakeholders.	Memanfaatkan alokasi anggaran pembangunan kesehatan untuk membiayai penyelenggaraan sarana dan prasarana.
Meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki profil kesehatan dari 18% menjadi 100%	Kabupaten/Kota yang memiliki profil kesehatan dari 18% menjadi 100%	Melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk penyusunan profil kesehatan.	Memanfaatkan profil kesehatan sebagai bahan informasi keputusan
Ketersediaan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menjadi 100% sampai tahun 2016	Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menjadi 100% sampai tahun 2016 dari setiap Kabupaten/Kota	Mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.	
Ketersediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat setiap tahun.	Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Provinsi Papua Barat, tersedia setiap tahun.	Perangkat Daerah (SKPD).	Daerah (SKPD) untuk menilai capaian kinerja Dinas Provinsi Papua Barat.
Merevitalisasi struktur Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.	Perubahan struktur Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.	Mengusulkan restrukturisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai dengan kebutuhan daerah.	Bertakunya struktur Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Meningkatkan jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dari 3.4% dari total pegawai pememntah daerah menjadi 6.2%.	Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat meningkat dari 3.4% dari total pegawai pemerintah daerah menjadi 6.2%.	Mengusulkan kebutuhan jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai kebutuhan.	Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (tahap II) rampung sebesar 100% pada tahun 2016.	Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (tahap II) rampung sebesar 100% pada tahun 2016.	Melakukan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (tahap II).	Memanfaatkan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan tugas dan jfungsi sebagai intansi terdepan dalam peningkatan derajat kesehatan.
Persentase pengelolaan gedung Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebesar 100%	Persentase pengeioloan gedung Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebesar 100%	Pengelolaan gedung Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.	Melaksanakan pengelolaan gedung Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
Pembangunan Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua Barat rampung 100% pada tahun 2016.	Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua Barat rampung 100% pada tahun 2016.	Melakukan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua.	Memanfaatkan Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai tempat laboratorium rujukan
Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah Pembangunan Bapelkes dan Mess Kesehatan rampung pada tahun 2016	Melakukan perencanaan, dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bapelkes dan Mess Kesehatan Provinsi Papua	Memanfaatkan tanah sebagai lahan pembangunan Bapelkes dan Mess Kesehatan Provinsi Papua.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES)	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Papua Barat rampung 100% pada tahun 2016	Melakukan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Provinsi Papua.	Melaksanakan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Provinsi Papua.
Pembangunan Mess Kesehatan	Mess Kesehatan Dinkes Provinsi Papua Barat rampung 100% pada tahun 2016	Melakukan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Mess Kesehatan Provinsi Papua,	Melaksanakan pembangunan Mess Kesehatan (BAPELKES) Provinsi Papua.
Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi	Rumah Sakit Rujukan Provinsi Rampung 50% pada tahun 2016	Melakukan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Papua.	Melaksanakan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Papua.
Prosentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SOW) Kesehatan aparatur PNS dan PIT sebesar 80%	Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SOM) Kesehatan aparatur PNS dan PIT, terpenuhi sebesar 80%	Melakukan telaah kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan aparatur PNS dan PIT.	Memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan aparatur PNS dan PIT dalam pelayanan kesehatan.
Prosentase prcxjuk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian sebesar 70%.	Produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian sebesar 70%.	Produk administrasi kepegawaian yang dikelola meialui sist&m layanan kepegawaian.	Produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian sebesar 70%.
Prosentase teriaksananya layanan surat menyurat dengan prosedur yang benar sebesar 100%.	Layanan surat menyurgt dengan prosedur yang benar sebesar 100%.	Menyelenggarakan layanan surat menyurat dengan prosedur yang benar.	Memanfaatkan surat menyynrat dengan prnsedur yang benar untuk tataketola adminisirasi yang baik.
Teriaksananya dukungan pelaksanaan terhadap tugas-tugas teknis iainnya pada Sekretariat sebesar 5 (lima) dokumen	Dukungan pelaksanaan terhadap tugas-tugas teknis lainnya pada Sekretariat sebesar 5 (lima) dokumen	Menyediakan dukungan pelaksanaan temadap tugas-tugas teknis lainnya pada Sekretariat sebesar 5 (lima) dokumen	Memanfaatkan dukungan pelaksanaan terhadap tugas-tugas teknis lainnya pada Sekretariat sebesar 5 (lima) dokumen

VISI : MEWUJUDKAN PAPUA BARAT YANG SEHAT, BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERKEADILAN
MISI II : BENJAMIN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN YANG BERKUALITAS, MERATA DAN TERJANGKAU

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan ketersediaan obat buffer stock provinsi Papua Pirat dan 37% menjadi 70%.	Tersedianya obat buffer stock provinsi sebesar 70% pada tahun 2016.	Peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan obat buffer stock provinsi	Pembuatan perencanaan obat buffer stock provinsi
Memperkenalkan penggunaan obat asli Papua.	Dikenainya minimal 1(satu) spesies obat asli Papua.	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan balai penelitian untuk pengembangan obat asli Indonesia	Menetapkan 1 spesies obat asli Papua kepada masyarakat
Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan dari 80,9% menjadi 95%.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan naik menjadi 95% pada tahun 2016.	Pemantauan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit PKS Jamkesmas
Meningkatkan jumlah Rumah Sakit yang melayani pasien penduduk miskin peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dari 6 Rumah Sakit menjadi 14 Rumah Sakit.	Jumlah Rumah Sakit yang melayani pasien miskin peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi 15 Rumah Sakit.	Menyefenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah
Tersedianya RS Rujukan (Provinsi) dan 2 RSUD Kabupaten/Kota pada tahun 2016.	Berdirinya 1 RS Rujukan (Provinsi) dan 2 RSUD Kabupaten/Kota.	Komunikasi jejaring rumah sakit se-Papua Barat	Penyediaan dana APBD untuk Program Jaminan Kesehatan Daerah

VISI : **MEWUJUDKAN PAPUA BARAT YANG SEHAT, BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERKEADILAN**
MISI III : **MENJAMIN KETERSEDIAAN, MUTU, DAN PEMERATAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**

Meningkatkan keberadaan SDMK pada fasilitas pelayanan	Terpenuhinya kebutuhan SDMK pada fasilitas pelayanan kesehatan	1. Pembinaan perencanaan kebutuhan SDMK	Penempatan SDMK sesuai fasilitas pelayanan kesehatan
		2. Sosialisasi dan advokasi kebijakan SDM Kesehatan	
		3. Penempatan tenaga kesehatan strategis pada Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan sesuai standar	Terpenuhinya standar kompetensi SDM Kesehatan	1 . Pembinaan SDM Kesehatan	1 . Menyelenggarakan diklat
		2. Penyesuaian jenjang pendidikan dengan pendekatan affirmative action	2. Memfasilitasi tenaga fungsional dengan pendidikan berkelanjutan
		3. Penyediaan sarana/prasarana pendidikan dan pelatihan	3. Menyediakan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang kompetitif
Meningkatkan pengawasan mutu tenaga kesehatan	Terselenggaranya registrasi tenaga kesehatan sebagai sarana menjaga mutu pelayanan	Pembinaan tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan	Membina tenaga kesehatan dalam proses sertifikasi dan registrasi

VISI : MEWUJUDKAN PAPUA BARAT YANG SEHAT, BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERKEADILAN

MISI IV : MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG MEMENUHI STANDARD DAN TERJANGKAU

Menurunkan Angka Kematian Ibu dari 294/100.000 KH (sesuai laporan Rutin) menjadi 202/100.000 KH	Angka Kematian Ibu menurun sebesar 31 % pada tahun 2016	1. Peningkatan pelayanan antenatal terpadu, persalinan oleh tenaga tertatih, dan pelayanan nifas dan bayi baru lahir	<p>1. semua ibu hamil mendapatkan antenatal komprehensif (10 T) oleh tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan Antenatal Terpadu dan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu KeAnak(PPIA).</p> <p>2. Semua persalinan ditolong oleh tenaga kesesiatan tertatih dan mampu mengelola Kala 3 persalinan secaraaktif serta penanganan komplikasi yang tepat waktu.</p> <p>3. Semua ibu bersalin dan bayi baru lahir baik yang ditolong oleh tenaga kesehatan tertatih maupun tidak teriatih mendapatkan pelayanan Nifas minimal 3 kali selama rnas nifas dan Pelayanan bayi baru lahir minimal 3 kali sampai dengan bayi berumur 28 hari</p>
---	---	--	---

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		<p>2. Peningkatan ketersediaan layanan rujukan baik di masyarakat, tingkat puskesmas dan rumah sakit rujukan yang sesuai dengan standar</p>	<p>1. Peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan di Puskesmas dalam penanganan obstetri neonatal emergensi dasar minimal 4 Puskesmas per kabupaten/Kota 2. Mendukung rumah sakit umum daerah di kabupaten / kota untuk mampu memberikan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif</p>
		<p>3. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk ketersediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir</p>	<p>1. Menyediakan paket pertolongan persalinan di semua level unit pelayanan 2. Perbaiki sistem logistik untuk menjamin ketersediaan obat dan alat esensial untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir</p>
		<p>4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dini faktor resiko pada ibu hamil dan bersalin serta bayi baru lahir</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas kader dan masyarakat untuk deteksi dini faktor resiko dan mengenali tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. 2. Membangun kerjasama antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam melaksanakan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.(P4K) 3. Mendorong kemitraan antara tenaga kesehatan dan dukun bersalin dalam upaya meningkatkan pelayanan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		<p>2. Peningkatan ketersediaan layanan rujukan baik di masyarakat, tingkat puskesmas dan rumah sakit rujukan yang sesuai dengan standar</p>	<p>4. Mendorong pelaksanaan Kelas Ibu di masyarakat untuk mempersiapkan ibu dalam masa kehamilan, persalinan, nifas dan perawatan bayi baru lahir.</p> <p>5. Mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan rumah tunggu persalinan dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.</p> <p>6. Meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan pihak swasta, LSM, donor dan organisasi profesi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak</p>
		<p>5. Penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu yang berkualitas</p> <p>6. Peningkatan kerjasama lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam program kesehatan reproduksi terpadu yang responsif gender</p>	<p>1. Peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam melaksanakan PKRET yang responsif gender sesuai tupoksi komponen Kespro termasuk dalam situasi darurat bencana</p> <p>2. Pembentukan Puskesmas PKRET diprioritaskan pada Pusk. mampu PONED</p> <p>3. Pemenuhan sarana prasarana pelaksanaan PKRET, termasuk Pedoman dan KIE</p> <p>1. Mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Kespro di tingkat pelayanan kesehatan</p> <p>2. Membentuk dan memfungsikan Komisi Kesehatan Reproduksi baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kab/Kota</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		7. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas	1. Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas 2. Penyediaan sarana KIE untuk pelayanan KB yang berkualitas.
Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 29,2/1000 (Data BPS 2010) menjadi 25/1000 KH	Angka kematian bayi menurun sebesar 14 % pada tahun 2016	1. Peningkatkan akses dan kualitas pelayanan 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 3. Penguatan manajemen 4. Peningkatan pembiayaan kesehatan	1. Peningkatan Outreach berbasis Fasilitas 2. Memperluas fungsi Bidan Desa. 3. Memperkuat Sistem Rujukan. 4. Mengurangi Hambatan finansial. 5. Peningkatan Jumlah dan persebaran tenaga kesehatan terlatih termasuk preservice dan inservice Training bagi tenaga kesehatan strategis. 6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan kesehatan anak melalui pelaksanaan program perubahan perilaku dan KIE yang lebih intensif 7. Penguatan Pemberdayaan dan Revitalisasi Posyandu 8. Penguatan Koordinasi Lintas Program, lintas sektor dan swasta serta partisipasi seluruh stakeholder dalam mendukung, manajemen, pengembangan kebijakan dan proses perencanaan 9. Penguatan Surveillance, Monitoring, Evaluasi serta Pembiayaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan status gizi masyarakat di Provinsi Papua Barat dengan	Prevalensi Stunting menurun sebesar 33 % pada 2016 DAN Prevalensi gizi kurang/gizi buruk menurun sebesar 43 % pada 2016	1. Peningkatan pelayanan anak balita dan ibu hamil untuk mendapatkan makanan yang aman	1. Peningkatan pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil KEK dan Balita KEP terutama untuk

memprioritaskan pada upaya untuk menurunkan prevalensi balita dengan masalah kependekan menjadi 32%,		dan bergizi cukup terutama untuk keluarga miskin	keluarga miskin. 2. Peningkatan pemberian suplement makanan bagi ibu hamil. Ibu Menyusui dan bayi dan balita terutama untuk keluarga miskin.
menurunkan prevalent balita gizi buruk dan kurang menjadi 15,5% serta mempertahankan prevalensi balita dengan masalah kekurusan <12,0% pada tahun 2016		2. Peningkatan pemberian ASI Eksklusif serta Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan dan pemberian MPASI untuk balita	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas kesehatan terutama mengenai ASI eksklusif dan MPASI 2. Peningkatan promosi kesehatan terutama mengenai ASI Eksklusif dan MPASI 3. Peningkatan kuantitas konsetor ASI dan MPASI 4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pemberian MPASI yang berbahan local
		3. Peningkatan kunjungan balita ke posyandu dengan Peningkatan kualitas posyandu dan peran serta masyarakat	1. Meningkatkan koordinasi intersektor pemerintah untuk mengatasi berbagai faktor yang mendasari (underlying factors) munculnya permasalahan gizi masyarakat, termasuk ketahanan pangan, kemiskinan, daya beli, sosial budaya, tingkat pendidikan, infrastruktur dan sebagainya; 2. Memberikan ruang gerak yang lebih luas dan dukungan kepada Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM),

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			termasuk Posyandu, Desa Siaga dan sebagainya; 3. Meningkatkan kapasitas dan peran kader Posyandu dan Tim Penggerak PKK dalam upaya-upaya yang bersifat preventif dan promotif serta

			<p>pemanfaatan bahan pangan lokal;</p> <p>4. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta-melalui Corporate Social Responsibility (CSR)</p>
		4. Peningkatan perawatan anak gizi buruk sesuai tatalaksana anak gizi buruk di fasilitas kesehatan	<p>1 Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam upaya pemantauan tumbuh kembang balita dan upaya penanganan kasus;</p> <p>2. Meningkatkan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan balita gizi buruk;</p>
		5. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi gizi	<p>1. Peningkatan surveillance gizi dan sistem Informasi kesehatan</p> <p>2. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan gizi.</p> <p>3. Koordinasi dan evaluasi program gizi secara rutin</p>
Meningkatkan Prosentase fasilitas kesehatan rujukan yang terakreditasi sebesar 45 %	Fasilitas kesehatan rujukan terakreditasi meningkat sebesar 45 % pada 2016	<p>Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Rumah Sakit melalui:</p> <p>1. Penguatan manajemen Rumah Sakit; .</p> <p>2. Peningkatan pembiayaan Fasilitas Kesehatan di RS</p>	<p>Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Rumah Sakit:</p> <p>1. Meningkatkan kualitas manajemen Pelayanan RS;</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Nakes Dalam Pelayanan kesehatan yang prima</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya akses pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan	Meningkatnya masyarakat daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan yang mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas	<p>1. Peningkatan Akses layanan berupa sarana dan prasarana;</p> <p>2. Peningkatan SDM Kesehatan yang berkualitas;</p> <p>3. Peningkatan Ketersediaan Obat-Obatan</p>	<p>1. Penyediaan sarana dan prasaarana kesehatan;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan;</p> <p>3. Penyediaan obat- obat dan perbekalan kesehatan;</p> <p>4. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bergerak</p>

		Kesehatan; 4. Mendekatkan Akses layanan kepada masyarakat	
Mempertahankan angka kematian calon jemaah haji £ 2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji	Angka kematian calon jemaah haji £ 2 per 1.000 calon jemaah haji pada setiap tahun penyelenggaraan haji sampai tahun 1437H/2016M	(1). Memberikan dukungan seoptimal mungkin dalam berbagai aspek, agar Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota serta kelembagaan terkait dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan haji sesuai standar	(1). Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pada setiap jenjang administratif untuk memaksimalkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan haji (2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon jemaah haji, baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas (3). Menyediakan Buku Kesehatan Jemaah Haji, vaksin, media KIE, peralatan pemeriksaan kesehatan haji, sistem pencatatan-pelaporan kesehatan haji secara cukup dan tepat waktu di Kabupaten/Kota penerima kuota calon jemaah haji (4). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan haji di Kabupaten/Kota penerima kuota calon
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			jemaah haji agar sesuai standar (5). Memastikan pelayanan kesehatan haji yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional
Mewujudkan penyelenggaraan dan	Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer	(1). Memberikan dukungan seoptimal mungkin	(1). Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pada setiap

pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sesuai standar pada 70% Kabupaten/Kota	sesuai standar pada 70% Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2016	dalam berbagai aspek, agar Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota serta kelembagaan terkait dapat menyetenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sesuai standar	jenjang administratif untuk memaksimalkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer
			(2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam salah satu metode pelayanan kesehatan tradisional; alternatif dan komplementer
			(3). Membentuk dan menjamin operasionalisasi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) di Provinsi Papua Barat
			(4). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer di Kabupaten/Kota agar sesuai standar
			(5). Memastikan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan penyelenggaraan dan pengembangan yankes kesehatan jiwa sesuai standar 50% Kab/Kota	Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada 50% Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2016	(1). Memberikan dukungan seoptimal mungkin dalam berbagai aspek, agar Dinkes Prov, Dinkes dan RS Kab/Kota serta sektor terkait dapat mengembangkan yankes jiwa sesuai standar	(1). Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pada setiap jenjang administratif untuk memaksimalkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan jiwa
Mewujudkan penyelenggaraan dan	Penyelenggaraan dan pengembangan	(1). Memberikan dukungan seoptimal mungkin	(2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan

<p>pengembangan pelayanan kesehatan indera sesuai standar pada 50% Kabupaten/Kota</p>	<p>pelayanan kesehatan indera sesuai standar pada 50% Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2016</p>	<p>dalam berbagai aspek, agar Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan dan Runiah Sakit Kabupaten/Kota serta kelembagaan terkait dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan indera sesuai standar</p>	<p>keterampilan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan jiwa, baik di tingkat fasilitas kesehatan maupun di tingkat komunitas</p> <p>(3). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten/Kota agar sesuai standar</p> <p>(4). Memastikan pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional</p> <p>(1). Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pada setiap jenjang administratif untuk memaksimalkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan indera</p> <p>(2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan indera</p> <p>(3) Menyediakan Kit Kesehatan Indera dan peralatan bedah mikro telinga untuk menunjang pelayanan kesehatan indera</p>
<p>TUJUAN</p>	<p>SASARAN</p>	<p>STRATEGI</p>	<p>KEBIJAKAN</p>
			<p>di Puskesmas dan Rumah Sakit (4). Mendukung peran Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT) Sorong dalam membantu Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengembangkan pelayanan kesehatan indera</p>

			(5). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan indera di Kabupaten/Kota agar sesuai standar
			(6). Memastikan pelayanan kesehatan indera yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional
Mewujudkan penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar pada 50% Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar pada 50% Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2016	(1). Memberikan dukungan seoptimal mungkin dalam berbagai aspek, agar Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota serta kelembagaan terkait dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar	(1). Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pada setiap jenjang administratif untuk memaksimalkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan lanjut usia (2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan lanjut usia (3) Menyediakan Kit Lanjut Usia untuk menunjang pelayanan kesehatan lanjut usia di Puskesmas dan Posyandu Lansia (4). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia di Kabupatea/Kota agar sesuai standar
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			(5). Memastikan pelayanan kesehatan lanjut usia yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional
Mewujudkan penyetenggaraan dan	Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar pada	(1). Memberikan dukungan seoptimai mungkin	(1). Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pada setiap

<p>pengembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar pada 50% Kabupaten/Kota</p>	<p>50% Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2016</p>	<p>dalam berbagai aspek, agar Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota serta ketembagaan terkait dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar</p>	<p>jenjang administratif untuk memaksimalkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut</p> <p>(2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut</p> <p>(3) Menyediakan peralatan kesehatan untuk menunjang pelayatian kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas</p> <p>(4). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesahatan gigi dan mulut di Kabupaten/Kota agar sesuai standar</p> <p>(5). Memastikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional</p>
<p>Mewujudkan penyetenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan kerja sesuai standar pada 20% Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan kerja wsuai standar pada 20% Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2016</p>	<p>(1). Memberikan dukungan seoptimai mungkin dalam berbagai aspek, agar Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota serta ketembagaan terkait dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan</p>	<p>(1). Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait psda setiap jenjang administratif untuk memaksimalkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan kerja</p>
<p>TUJUAN</p>	<p>SASARAN</p>	<p>STRATEGI</p>	<p>KEBIJAKAN</p>
		<p>kerja sesuai standar</p>	<p>(2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan kerja</p>
			<p>(3) Menyediakan peralatan kesehatan untuk</p>

			<p>menunjang pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas</p> <p>(4). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja di Kabupaten/Kota agar sesuai standar</p> <p>(5). Memastikan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional!</p>
<p>Mewujudkan penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan olah raga sesuai standar pada 30% Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan olah raga sesuai standar pada 30% Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2016</p>	<p>(1). Memberikan dukungan seoptimal mungkin dalam berbagai aspek, agar Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kab/Kota serta kelembagaan terkait dapat mengembangkan yan kes olah raga sesuai standar</p>	<p>(1). Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pada setiap jenjang administratif untuk memaksimalkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan olah raga</p> <p>(2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan olah raga</p> <p>(4). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan olah raga di Kabupaten/Kota agar sesuai standar</p>
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		<p>kerja sesuai standar</p>	<p>(2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan kerja</p> <p>(3) Menyediakan peralatan kesehatan untuk</p>

			menunjang pelayanan kesehatan kerja di Puskesmas
			(4). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja di Kabupaten/Kota agar sesuai standar
			(5). Memastikan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional!
Mewujudkan penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan olah raga sesuai standar pada 30% Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan olah raga sesuai standar pada 30% Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2016	(1). Memberikan dukungan seoptimal mungkin dalam berbagai aspek, agar Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kab/Kota serta kelembagaan terkait dapat mengembangkan yankes olah raga sesuai standar	(1). Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pada setiap jenjang administratif untuk memaksimalkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan olah raga
			(2). Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan olah raga
			(4). Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pelayanan kesehatan olah raga di Kabupaten/Kota agar sesuai standar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			(5). Memastikan pelayanan kesehatan olah raga yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional

VISI : MEWUJUDKAN PAPUA BARAT YANG SEHAT, BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERKEADILAN

MISI V : MELINDUNGI MASYARAKAT DAR! PENYAKIT DAN MENGURANGI RESIKO TERJADINYA PENYAKIT, KECELAKAAN DAN DAMPAK BENCANA

Menurunkan API (annual Parasite Incidence) dari 68.68 per 1000 penduduk menjadi 48 perseribu penduduk	1. API (annual Parasite Incidence) menurun hingga 48 0/00 penduduk di tahun 2016	1. meningkatkan kualitas dan jumlah layanan dalam menunjang EDPT;	a. Peningkatan Sumber Daya Manusia kesehatan b. Penyediaan Obat dan perbekalan Logistik cukup dan memadai.
		2. Melibatkan masyarakat, lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanggulangan;	a. peningkatan pengetahuan dan melakukan pemberdayaan masyarakat; b. Pembentukan jejaring dan koordinas serta kegiatan yang berintegrasi.
		3. Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan;	a. Melakukan penjangkauan layanan untuk daerah prioritas
		4. Penelitian dan pengembangan program malaria;	a. Melakukan Penelitian dan pengembangan
		5. Melakukan upaya pengendalian vektor;	a. Menekan populasi vector dengan pendekatan kimia dan biologi
		6. Peningkatan sistem surveilans dan SKD malaria.	a. Meningkatkan sistem RR dan analisis data
vlenurunnya angka prevalensi kasus HIV AIDS dari 2,4% menjadi 0,5% dan meningkatkan kualitas hidup ODHA	Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 menjadi <0,5% pada tahun 2016	Meningkatkan akses layanan HIV dan AIDS serta aksesdukungan, perawatan dan pengobatan	Pelatihan manajemen HIV komprehensif
			Pelatihan manajemen program
			Pelatihan Sera Surveilans
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Sero Survailans dilakukan pada populasi resiko tinggi setiap tiga tahun sekali
			Pelaksanaan Pemeriksaan dan pengobatan IMS pada populasi resiko tinggi
			Monitoring dan Evaluasi

			Operasional LKB (Layanan Komprehensif & Berkesinambungan)
			Supervisi dan Monitoring
			Pertemuan penyusunan kebijakan program HIV dan IMS
			Sosialisasi Hasil Kebijakan terkait program HIV dan IMS
			Pertemuan monitoring dan evaluasi implementasi program HIV dan IMS
			Advokasi kepada seluruh pimpinan RS di Papua Barat untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan perawatan, dukungan dan pengobatan kepada ODHA
			Membentuk dan mengembangkan pokja AIDS di semua rumah sakit kabupaten/kota se Papua Barat.
			Pembentukan dan pengembangan pusat layanan VCT di semua rumah sakit dan puskesmas di kabupaten/kota se Papua Barat
			Pelayanan dukungan gizi bagi ODHA
			Pelatihan manajemen logistik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Pengadaan kebutuhan logistik BAKHP
			Pendistribusian logistik
			Pengadaan sarana dan prasarana gudang

			Monitoring dan Evaluasi Logistik
			Penyusunan standar laboratorium di semua tingkat layanan
Menurunkan angka cacat tingkat 2 per 100.000 penduduk tahun 2011 turun 35 % di tahun 2016 per 100.000 penduduk.	Angka cacat tingkat 2 menurun menjadi 35 % di tahun 2016.	meningkatkan akselerasi kegiatan dan perencanaan pelayanan kesehatan terpadu	Implementasi kendali mutu internal dan eksternal terkait laboratorium di semua layanan
Masih terdapatnya kasus Penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi yang berpotensi menjadi KLB dan kematian	Meningkatkan Desa UCI (universal Child Immunization) dan 55,13% menjadi 100%	Desa UCI meningkat menjadi 100% di tahun 2016	Pelatihan tenaga laboratorium
			Pelaksanaan Gerakan Akseterasi Imunisasi Nasional (GAIN) UCI,
			Penguatan Pemantauan Wilayah setempat program imunisasi
			Pemenuhan sumber daya baik tenaga yang kompeten, peralatan cold chain, vaksin dan alat suntik (ADS) serta pembiayaan operasional.
			Perberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
			Peningkatan jangkauan pelayanan Sustainable Outreach Service (SOS).
			Menyetenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi Imunisasi.
Belum semua kabupaten/kota melaporkan penemuan kasus AFP	Membuktikan Papua Barat bebas Polk), dengan menemukan semua kasus AFP	Menemukan kasus AFP sesuai target 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun	- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenal tanda dan gejala AFP

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	yang ada di Papua Barat		- Menyediakan bahan-bahan informasi mengenai surveilans AFP ke masyarakat
			- Melacak setiap kasus kelumpuhan yang

			dilaporkan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa kelumpuhan tersebut adalah AFP
			- Melakukan pemeriksaan spesimen tinja terhadap kasus AFP
			- Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam Surveilans AFP
			- Mengaktifkan kembali Surveilans Aktif RS
Meningkatnya perilaku masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor resiko penyakit tidak menular.	100% kabupaten melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan PTM	Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait(stakeholders)	Peningkatan kebijakan publik berwawasan kesehatan
Menurunkan angka cacat tingkat 2 per 100.000 penduduk tahun 2011 turun 35 % di tahun 2016 per 100.000 penduduk.	Angka cacat tingkat 2 menurun menjadi 35 % di tahun 2016.	meningkatkan akselerasi kegiatan dan perencanaan pelayanan kesehatan terpadu	Pelaksanaan program pengendalian kusta berintegrasi dengan Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
Meningkatkan dan mengembangkan SDM TB secara komprehensif	Terlatihnya Petugas kesehatan yang menangani TB	Meningkatkan pengetahuan komprehensif tentang TB pada semua penduduk	Melakukan sosialisasi, pelatihan dan penyebaran informasi tentang TB
			Menyediakan sarana dan prasarana layanan TB sampai tingkat pelayanan kesehatan dasar
			Meningkatkan jumlah Puskesmas yang melaksanakan DOTS
Meningkatkan akses jumlah penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak dan	Meningkatnya akses jumlah penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak dan	penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	pelatihan Sumberdaya Manusia Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
lingkungan yang sehat dari 45 % menjadi 55 %	lingkungan sehat menjadi 55 % di tahun 2016		Penyusunan NSPK (Norma, Standart, Pedoman dan kriteria)

			Koordinasi dan integrasi lintas sektor dan lintas program
--	--	--	---

VISI : MEWUJUDKAN PAPUA BARAT YANG SEHAT, BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERKEADILAN

MISI VI : MENINGKATKAN DERAJAD KESEKATAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERMASUK SWASTA

Meningkatkan persentase Kampung Siaga menjadi 60% pada tahun 2016	Persentase Kampung Siaga menjadi 60% pada tahun 2015	Advokasi kepada Stakeholders dalam pengembangan Kampung Siaga	Memanfaatkan pertemuan Advokasi kepada Stakeholders dalam pengembangan Kampung Siaga
Meningkatkan dukungan alokasi pembiayaan	Dukungan alokasi pembiayaan	Advokasi dalam peningkatan dukungan pembiayaan yang memadai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Memanfaatkan Advokasi dalam peningkatan dukungan pembiayaan yang memadai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Mendorong peningkatan kualitas tenaga promosi kesehatan diberbagai jenjang (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Puskesmas)	Kwalitas tenaga promosi kesehatan diberbagai jenjang	Pelatihan tenaga promosi kesehatan di Kabupaten/Kota, dan terutama di Puskesmas dan jaringannya	Memanfaatkan Pelatihan tenaga promosi kesehatan di Kabupaten/Kota, dan terutama di Puskesmas dan jaringannya sehingga promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik
Meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan dalam pengembangan Kampung Siaga	SDM Kesehatan dalam pengembangan Kampung Siaga	Training of Trainer (TOT) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam pengembangan Kampung Siaga Aktif	Memanfaatkan Training of Trainer (TOT) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam pengembangan Kampung Siaga Aktif
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi tentang hasil pelaksanaan program secara rutin dan up to date	Ketersediaan data dan informasi tentang hasil pelaksanaan program secara rutin dan up to date	Tersedianya data dan informasi tentang hasil pelaksanaan program secara rutin up to date	Memanfaatkan ketersediaan data dan informasi tentang hasil pelaksanaan program secara rutin up to date
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Ketersediaan laporan SPM bidang Promkes menjadi 60% pada tahun 2016	Laporan SPM bidang Promkes menjadi 60% pada tahun 2016	Tersedianya Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Promosi Kesehatan.	Memanfaatkan ketersediaan Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Promosi

			Kesehatan
Meningkatkan sekitar 70% dari jumlah posyandu yang ada, dapat menjalankan fungsinya dengan baik	Dari jumlah posyandu yang ada, dapat menjalankan fungsinya dengan baik	Sebesar 70% dari jumlah posyandu yang ada, dapat menjalankan fungsinya dengan baik	Memanfaatkan ketersediaan dari 70% jumlah posyandu yang ada, dapat menjalankan fungsinya dengan baik
Meningkatkan pembinaan terhadap Posyandu secara merata	Pembinaan terhadap Posyandu secara merata	Monitoring dan Supervisi dalam pembinaan posyandu terpilih	Memanfaatkan Monitoring dan Supervisi dalam pembinaan posyandu terpilih
Meningkatkan jumlah posyandu untuk memiliki jumlah kader tertatih sesuai perbandingan dengan jumlah sasaran	Posyandu untuk memiliki jumlah kader terlatih sesuai perbandingan dengan jumlah sasaran	Pelatihan Kader posyandu sehingga Posyandu memiliki jumlah kader terlatih yang cukup sesuai perbandingan dengan jumlah sasaran	Memanfaatkan pelatihan Kader posyandu sehingga Posyandu memiliki jumlah kader tertatih yang cukup sesuai perbandingan dengan jumlah sasaran

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT**

